

**PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN DI KELURAHAN PERHENTIAN MARPOYAN
KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
KOTA PEKANBARU**

Oleh :

ARON PILKO

177321009

TESIS

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian komprehensif
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

LEMBARAN PENGESAHAN

NAMA : Aron Pilko
NPM : 177321009
Program : Magister Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : **PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN DALAM
PEMBANGUNAN DI KELURAHAN PERHENTIAN
MARPOYAN KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
KOTA PEKANBARU**

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana,
Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau

Hari :
Tanggal :
Pukul :

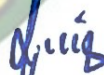
**Dan dinyatakan LULUS
PANITIA PENGUJI TESIS**

Ketua



Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Sekretaris



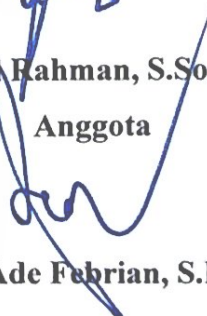
Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si

Anggota



Dr. Zainal, S.Sos., M.Si

Anggota



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

**Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau**



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

LEMBARAN PENGESAHAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang berjudul :

PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN PERHENTIAN MARPOYAN KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU

Oleh :

Nama : Aron Pilko
NPM : 177321009
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

**Telah diperiksa dan disetujui
oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan.**

Pembimbing I

Tanggal... 23 DES 2021


Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Pembimbing II

Tanggal... 24 DES 2021


Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan

Universitas Islam Riau


Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.I.P., M.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR : 308/KPTS/PPS-UIR/2019

TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA

PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Ingat :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Ingat :
1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor : 85/M/1999
 - b. Nomor : 102/M/2001
 - c. Nomor : 228/M/2001
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/O/2001
 5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
 - a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 5020/D/T/2010
 - b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 5021/D/T/2010
 - c. Nomor : 156/D/T/2007
 - d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
 - e. Nomor : 490/D/T/2007 Jo. Nomor : 5150/D/T/2011
 - f. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 5019/D/T/2010
 - g. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 7322/D/T/K-X 2012
 6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 7. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
 - a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993
 - b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
 8. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 129/UIR/KPTS/2008

MEMUTUSKAN

- Ingat :
1. Menunjuk :
 - a. Nama : Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si. sebagai Pembimbing I
 - b. Nama : Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si. sebagai Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : ARON PILKO
N P M : 17 732 1009
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : "PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN PERHENTIAN MARPOYAN KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU"

2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU

TANGGAL : 26 Juni 2019



Dr. H. Saiful Bahri, M.Ec.

02/11 02 199



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aron Pilko
NPM : 177321009
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan , dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan oleh orang lain, kecuali berupa kutipan dengan menyebutkan nama pengarang secara jelas dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dalam sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidak benaran dari apa yang saya nyatakan di atas (poin 1-3), maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan nilai ujian tesis dan/atau pencabutan gelar akademik magister dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru,

Yang Membuat Pernyataan,



Aron Pilko



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 296/A-UIR/5-PPS/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : ARON PILKO
NPM : 177321009
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 29 Desember 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui
Ketua Prodi Magister Ilmu Pemerintahan

Dr. Anindya Pitra Yuza, S.IP., M.A.

Pekanbaru, 29 Desember 2021
Staf Pemeriksa

Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip Meinigiva

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI
KELURAHAN PERHENTIAN MARPOYAN
KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA
PEKANBARU By: Aron Pilko

1% match (student papers from 28-May-2015)
Submitted to Unika Soegilapranata on 2015-05-28

LEMBAR PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselasaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

Ibunda dan Ayahanda Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu (Nila Asma) dan Ayah (Darman) yang telah memberikan kasih sayang, secara dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk Ibu dan ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik, Terima kasih Ibu... Terima kasih Ayah...

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si dan Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing tesis saya, terima kasih banyak sudah membantu selama ini, sudah dinasehati, sudah diajari, dan mengarahkan saya sampai tesis ini selesai.

Tanpa mereka, karya ini tidak akan pernah tercipta

LEMBARAN TUNJUK AJAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kemuliaan bagi orang yang berilmu, yaitu akan diangkat derajatnya oleh Allah.

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”. (Q.S Al-Mujadilah:11).

Rasulullah dalam sabdanya mengatakan bahwa perjalanan mencari ilmu merupakan salah satu jalan yang memudahkan kita menuju surga.

“Barang siapa yang menapaki suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”. (HR. Ibnu Majah & Abu Dawud).

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Lengkap : Aron Pilko
Tempat/Tgl Lahir : Lipatkain, 11 Agustus 1990
Usia : 31 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status : Menikah
Tinggi/Berat Badan : 170/80
Alamat Rumah : Jl. Tengku bey II, Perumahan Villa Berkah II, Blok A3

Pendidikan Formal :

2017-2021 : Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau
2015 : Lulus S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau
2009 : Lulus SMAN 1 Kampar Kiri
2005 : Lulus SMPN 1 Kampar Kiri
2002 : Lulus SDN 046 Lipatkain

Pekerjaan Saat ini :

2017-2021 : Staf LPM Universitas Islam Riau

Kemampuan/Keterampilan :

Komputer : Menguasai MS Office (word, excel and power point)
Hoby : Traveling, Olahraga.

Demikianlah Riwayat Hidup ini saya Buat.

Pekanbaru, 28 Desember 2021
Hormat Saya

Aron Pilko

**THE ROLE OF COMMUNITY EMPOWERMENT INSTITUTIONS IN
DEVELOPMENT IN PERHENTIAN MARPOYAN
SUB-DISTRICT MARPOYAN DAMAI
PEKANBARU CITY**

ABSTRACT

Aron Pilko

The Village Community Empowerment Institution (LPMK) is a community institution that grows from the community and for the community which has the function of accommodating and channeling community aspirations, and increasing community participation in planning, implementing and controlling development. One of the sub-districts in Marpoyan Damai Sub-district, Perhentian Marpoyan Sub-district was expanded from Maharatu Village. From this, Perhentian Marpoyan LPMK is relatively new, so it is necessary to see how far the role of LPMK is in assisting the Lurah in development planning. The research that will be used is qualitative research with descriptive research type. Qualitative research aims to explore and build a preposition or explain the meaning behind reality. Active role is the role of a person who is always active in the actions of an organization. Regarding the passive role of LPM in accommodating and channeling the aspirations of the people in Perhentian Marpoyan Village. Participatory Role is a form of participation in activities in the form of planning and implementation to achieve community development goals. In this case, the task of LPM is to increase community participation in achieving community development goals in the Marpoyan Perhentian Village. From the results of the research that the author did regarding the Role of Community Empowerment Institutions in Development Planning, the authors can draw the following conclusions: It can be seen that the role of Community Empowerment Institutions in Development in Perhentian Marpoyan Village, Marpoyan Damai District, Pekanbaru City Enough to play a role where community empowerment institutions have carried out their duties but not maximal. In accommodating and channeling community aspirations in Perhentian Marpoyan Village, LPM has not maximized community participation. Furthermore, it can also be seen the obstacles and obstacles in the field of knowledge of community empowerment institutions, the lack of a sense of embracing each other to build together between Kelurahan and LPM and jointly increase community participation.

**PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN DI KELURAHAN PERHENTIAN MARPOYAN
KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
KOTA PEKANBARU**

ABSTRAK

Aron Pilko

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dari masyarakat dan untuk masyarakat yang mempunyai fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendali pembangunan. Salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai, Kelurahan Perhentian Marpoyan dimekarkan dari Kelurahan Maharatu, Dari hal itu LPMK Perhentian Marpoyan tergolong baru, sehingga perlu dilihat sejauh mana peran LPMK membantu Lurah dalam perencanaan pembangunan. Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian Kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan menggali dan membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna dibalik realita . Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakan pada suatu organisasi. Mengenai peran pasif LPM menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Kelurahan Perhentian Marpoyan. Peran Partisipatif wujud dari peran serta dalam aktivitas berupa perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Dalam hal ini tugas dari LPM untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan masyarakat di Kelurahan Perhentian Marpoyan. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : Dapat diketahui bahwa peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Cukup berperan dimana Lembaga pemberdayaan masyarakat sudah melaksanakan tugasnya namun belum secara maksimal. Dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Kelurahan Perhentian Marpoyan LPM belum maksimal meningkatkan partisipasi masyarakat. Selanjutnya dapat pula diketahui hambatan-hamta n dan kendalanya pada bidang pengetahuan lembaga pemberdayaan masyarakat, kurangnya rasa saling merangkul untuk membangun bersama antara Kelurahan dan LPM dan bersama meningkatkan partisipasi masyarakat.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang tak pernah berhenti melimpahkan karunia-Nya kepada Penulis, sehingga apa yang dilakukan Penulis berjalan dengan lancar.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Islam Riau **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL** dan Bapak **Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum** selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau, atas kesempatan yang diberikan kepada Penulis untuk menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin. Kepada Bapak **Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si** selaku Wakil Direktur I Pascasarjana sekaligus Dosen Pembimbing dan Bapak **Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si** yang telah memberi bimbingan dan arahan dalam penulisan Proposal Tesis ini. Ketua Prodi Magister Ilmu Pemerintahan Bapak **Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A.** terima kasih atas segala fasilitas dan ilmu yang diberi selama masa pendidikan. Terima kasih kepada Kedua Orang Tua, seluruh dosen, rekan-rekan, dan semua pihak yang telah membantu dan terus memberi dukungan dalam penulisan ini. Semoga kebaikan Bapak Ibu, menjadi pemberat amal kebajikan di sisi Allah SWT.

Penulis sudah berusaha dengan baik, namun jika terdapat kekeliruan dan kekurangan, penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pembaca, agar tesis ini menjadi lebih baik, dan dapat memberi manfaat bagi pembaca khususnya, dan bagi generasi yang akan datang.

Pekanbaru, 28 Desember 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan Pembimbing.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Surat Pernyataan.....	iv
Lembar Persembahan.....	v
Lembar Tunjuk Ajar.....	vi
Riwayat Hidup Penulis.....	vii
Abstract.....	viii
Abstrak.....	ix
Kata Pengantar.....	x
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Gambar.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	16
1.3 Rumusan Masalah.....	16
1.4 Batasan Masalah	16
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	17
1.5.1 Tujuan Penelitian.....	17
1.5.2 Manfaat Penelitian.....	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pemerintahan.....	20
2.2 Konsep Pemerintah.....	25
2.3 Pelayanan Publik.....	27
2.4 Manajemen.....	28
2.5 Konsep Kepemimpinan.....	35
2.6 Konsep Pembangunan.....	35
2.7 Pemerintah Kelurahan.....	39
2.8 Lembaga Kemasyarakatan.....	41
2.9 Konsep Koordinasi.....	48
2.10 Konsep Peranan.....	51
2.11 Ulasan Karya.....	56
2.12 Kerangka Pemikiran.....	57
2.13 Konsep Operasional.....	57

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian.....	59
3.2 Lokasi Penelitian.....	60
3.3 Sumber Informan.....	60
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	61
3.5 Teknik Analisis Data.....	62
3.6 Jadwal Penelitian.....	63

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	64
4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru.....	64

4.1.2 Demografi Kota Pekanbaru.....	66
4.1.3 Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau.....	69
4.1.4 Sejarah Kecamatan Marpoyan Damai.....	71
4.1.5 Profil Pemerintahan Kelurahan Perhentian Marpoyan.....	73
4.1.6 Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan.....	76
4.2 Hasil Penelitian.....	79
4.2.1 Peran Aktif.....	83
4.2.2 Peran Pasif.....	87
4.2.3 Peran Partisipatif.....	88
4.3 Hambatan LPM dalam membantu Perencanaan Pembangunan.....	92
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	96
5.2 Saran.....	96
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).....	12
Tabel II.1. : Penelitian terdahulu mengenai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.....	47
Tabel III.1 Jadwal dan waktu penelitian.....	54
Tabel IV.1. Jarak Pekanbaru Dengan Kota-Kota Lain Sebagai Ibu Kota Provinsi.....	60
Tabel IV.2. Camat Marpoyan Damai dari 2007.....	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 : Susunan Organisasi LPM.....	11
Gambar II.1 : Kerangka Pikir.....	48



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, Pernyataan ini secara tegas tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Didalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, pemerintah merupakan alat kelengkapan negara yang mempunyai peranan penting untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Pada hakikatnya tujuan pembangunan suatu Negara dilaksanakan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan bahwa tujuan pembangunan Nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan Nasional, yaitu pembangunan negara Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 di atas menegaskan bahwa dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, Negara Indonesia dibagi atas

wilayah provinsi dan di dalam wilayah provinsi dibagi atas wilayah kabupaten/kota yang masing-masing wilayah baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memiliki pemerintahan sendiri yang disebut dengan pemerintahan daerah yang memiliki hak dan kewenangan menjalankan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat.¹

Indonesia merupakan negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi tersebut dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta menghasilkan potensi dan keanekaragaman daerah. Hal tersebut sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan dibentuknya Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat melalui otonomi luas. Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip

¹ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18

demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberhasilan pembangunan Nasional terukur dari meratanya pembangunan sampai ke daerah-daerah maka dengan sendirinya akan terwujud pembangunan Nasional secara menyeluruh. Keikutsertaan masyarakat setempat juga merupakan hal penting dalam pembangunan di pedesaan dan kelurahan. Hal ini tentu ada keterikatan emosional terhadap lingkungan sekitarnya. Tentu saja masyarakat mengetahui kekayaan potensi serta kemampuan yang dimiliki oleh daerahnya dan disamping itu pula masyarakat merupakan salah satu penggerak pembangunan di daerahnya.

Pelimpahan kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, baik untuk merumuskan visi dan misi diberbagai instansi ataupun menerapkan standar prosedur kerja yang ada di instansi-instansi atau dinas-dinas di daerah tersebut.

Aparatur pemerintah sebagai ujung tombak daripada pelaksana pembangunan serta berfungsi sebagai pelayanan masyarakat dituntut untuk selalu proaktif bekerja dengan semangat yang tinggi dalam menghadapi persoalan yang ada dalam masyarakat dan juga harus mampu mengkoordinir segala tuntunan yang ada. Meningkatkan tuntunan tersebut maka akan terjadi juga peningkatan tugas dan tanggungjawab semua aparatur pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah.

Selain itu sudah menjadi tugas pemerintah untuk mengelola dan meningkatkan pendapatan daerah, memajukan perekonomian masyarakat, dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia agar mampu melaksanakan tugas serta

peran sesuai tuntutan yang telah direncanakan sebelumnya dalam organisasi tersebut. Upaya meningkatkan sumber daya manusia menjadi salah satu alternatif kebijakan dalam rangka mencapai efektifitas dan efeksien setiap bidang aktifitas manusia.

Kebijakan otonomi daerah ditujukan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu ruang lingkup kerja yang ideal dari berbagai dimensi. Otonomi yang luas dan utuh dalam lingkungan kerja yang ideal, akan menciptakan kemampuan pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan pelayanan publik, pengembangan potensi daerah dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal dalam skala yang lebih luas.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam melaksanakan fungsi pemerintahan adalah melayani masyarakat dari berbagai aktivitasnya dan untuk itulah maka pemerintah membentuk sistem administrasi dan birokrasi dari pemerintahan tingkat yang tertinggi sampai ketingkat pemerintahan yang terendah agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi seluruh masyarakat dalam fungsinya sebagai pelayanan masyarakat atau public service.

Pembangunan merupakan suatu konsep perubahan sosial yang terus menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan Negara. Adanya suatu pembangunan di wilayah tertentu berarti adanya usaha pemerintah untuk menuju kearah perbaikan secara bertahap dan berencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan yang

dilaksanakan harus secara komperhensif, baik itu secara fisik maupun pembangunan dari sumber daya manusianya.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa daerah adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi, berwewenang mengatur dan mengurus daerahnya, sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya, sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.²

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah melalui pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa “pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Mentri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (1) mengemukakan bahwa urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Pada ayat (2) menjelaskan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi:

² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olah raga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

Pelaksanaan otonomi daerah dengan menganut asas desentralisasi seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perubahan mendasar dengan lebih mendekatkan pemerintah (jangkauan pelayanan publik) kepada masyarakat, sehingga peran pemerintah sebagai pelayanan publik semakin terasa, serta keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat ditingkatkan.

Disusunnya pemerintahan secara bertingkat ini bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pemberian pelayanan yang baik pada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan pemerintahan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan

perumahan, meningkatkan kemampuan masyarakat. Berdasarkan peraturan pemerintah No. 17 tahun 2018 pada pasal 27 ayat (2), Lembaga kemasyarakatan Kelurahan dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah yang membantu pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.³

Program pembangunan kelurahan adalah suatu usaha-usaha jangka panjang yang mempunyai tujuan meningkatkan pembangunan pada suatu sektor tertentu untuk mencapai beberapa proyek kelurahan. Program juga dapat dipahami sebagai kegiatan sosial yang teratur mempunyai tujuan yang jelas dan khusus serta dibatasi oleh tempat dan waktu tertentu, program pembangunan dibatasi atas proyek-proyek pembangunan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana yang ada di kelurahan.

Lurah dibantu oleh lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam hal mengkaji dan menimbang hal-hal apa saja yang akan dimuat dalam RPJM, dengan demikian dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, hubungan antara lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan Lurah cukup erat dalam hal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Sehingga akan menjadi Pembangunan Jangka Menengah.

Sedangkan fungsi dan peranan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Sebagai mitra kerja pemerintahan adalah penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa/kelurahan. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan,

³ Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2018 pada pasal 27 ayat 2

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Menggali serta memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan, sebagai media komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dan antar masyarakat itu sendiri, memberdayakan dan menggerakkan potensi pemuda dalam pembangunan, mendorong mendirikan dan memberdayakan peranan wanita dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga, membangun kerjasama antar lembaga yang ada dimasyarakat dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tujuan pembentukan suatu lembaga kemasyarakatan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai gotong-royong dan kekeluargaan, gotong-royong dan kekeluargaan merupakan sandi-sandi utama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.⁴

Adapun arti penting lembaga kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan kemampuan dari lembaga kemasyarakatan agar lebih mandiri dan dapat melakukan setiap kegiatannya sendiri dalam membantu tugas atau fungsi pemerintah dalam melakukan pelayanan, pembangunan serta pemberdayaan pada masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat diawali dari musyawarah yang dilakukan pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang dipelopori oleh pihak kelurahan sebagai pihak yang menjadi fasilitator pembangunan. Selanjutnya hasil musyawarah yang telah dilakukan maka akan dibawa ke musyawarah pembangunan tingkat kelurahan, dimana disini akan dibahas mengenai pembangunan kelurahan yang akan

⁴ Koentjaraningrat (1985 : 56-57) dalam rauf dan munaf, 2015, Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia, Pekanbaru, Zanafa Publishing.

dibangun. Dalam musyawarah yang akan dilakukan di kelurahan ini seluruh aspirasi yang ada akan dibahas. Selanjutnya dalam musyawarah ini akan dibahas pembangunan mana yang akan menjadi prioritas dalam pembangunan nantinya, sehingga akan dapat menghindari pembangunan yang hanya akan menguntungkan kepentingan kelompok tertentu.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat yang mempunyai fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendali pembangunan.

Salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai, Kelurahan Perhentian Marpoyan dimekarkan dari Kelurahan Maharatu, Pada saat itu Pemko Pekanbaru memekarkan 25 kelurahan baru dengan jumlah total keseluruhan 83 Kelurahan di tahun 2017 salah satunya Kelurahan Perhentian Marpoyan. Dari hal itu LPMK Perhentian Marpoyan tergolong baru, sehingga perlu dilihat sejauh mana peran LPMK membantu Lurah dalam perencanaan pembangunan.

Berdasarkan Pemendagri No 18 tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan⁵ :

Pasal 3 ayat 1 Lembaga Kemasyarakatan dibentuk atas prakarsa Pemerintah dan masyarakat. Pada Ayat 2 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

- a. Berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Indonesia Tahun 1945;

- b. Berkedudukan di Desa setempat;
- c. Keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
- d. Memiliki kepengurusan yang tetap;
- e. Memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
- f. Tidak berafiliasi kepada partai politik.

Pasal 4 Ayat (1) Lembaga Kemasyarakatan bertugas:

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Kelurahan.

Pasal 5 Lembaga Kemasyarakatan memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

**SUSUNAN ORGANISASI
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018



Gambar I.1 : Susunan Organisasi LPM

Sedangkan fungsi dan peranan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Sebagai mitra kerja pemerintahan adalah penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa/kelurahan. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Menggali serta memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan, sebagai media komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dan antar masyarakat itu sendiri, memberdayakan dan menggerakkan potensi pemuda dalam pembangunan, mendorong mendirikan dan memberdayakan peranan wanita dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga, membangun kerjasama antar lembaga yang ada dimasyarakat dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tujuan pembentukan suatu lembaga

kemasyarakatan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai gotong-royong dan kekeluargaan, gotong-royong dan kekeluargaan merupakan sandi-sandi utama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.⁶

Menurut Tjosvold dalam Rauf dan Maulidiah mengatakan bahwa pelayanan umum merupakan kegiatan melayani masyarakat baik sebagai kewajiban, maupun sebagai kehormatan, merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat manusiawi. bagi organisasi, melayani konsumen merupakan saat yang menentukan (*moments of thrust*), peluang organisasi untuk menunjukkan kredibilitas dan kapabelitas.⁷

Untuk dapat menjalankan peranan tersebut secara efektif, maka LPM harus didukung oleh sumberdaya manusia pengurus/anggota yang mempunyai kualitas pengetahuan dan kecakapan/keterampilan yang memadai dibidang pembangunan desa, dan memiliki semangat dan komitmen yang kuat/tinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsi LPM dengan sebaik-baiknya. Selain itu LPM harus didukung dengan dana biaya operasional yang cukup, serta adanya komitmen dari pemerintah desa setempat untuk memberdayakan LPM berperan dalam pembangunan.

Tabel I.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

No	Bidang Pelaksana Pembangunan Desa
1.	Perbaikan jalan di lingkungan RT 01 RW 01
2.	Pembangunan Drainase RT 01 RW 05
3.	Pembangunan Kantor Kelurahan
4.	Pembangunan MCK
5.	Pembangunan Drainase Pembuangan RT 01 RW 02

⁶ Koentjaraningrat (1985 : 56-57) dalam rauf dan munaf, 2015, Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia, Pekanbaru, Zanaf Publishing.

⁷ Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah, Badan Permusyawaratan Desa, (Pekanbaru, Zanaf Publishing, 2016) hal 397

6.	Pembangunan Drainase Pembuangan RT 01 RW 04
7.	Pembangunan Drainase 1 lapangan pusat olah raga
8.	Pembuangan turap jalan menuju ke pemakaman
	Total Anggaran Rp. 890.870.000
No	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
1.	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan
2.	PKK
3.	Karang Taruna
4.	LPMK
5.	PAUD
6.	POSYANDU
7.	Pembinaan dan Ketertiban
8.	Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan (PDTA)
9.	Pengelolaan TPU
	Total Anggaran Rp. 49.579.000.00

Sumber: 2019

Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa di kelurahan Perhentian Marpoyan kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru pelaksanaan LPMK sebagai mitra dari lurah di dalam sistem pemerintahan kelurahan belum begitu menunjukkan hal-hal yang menuju pada orientasi pembangunan yang baik.

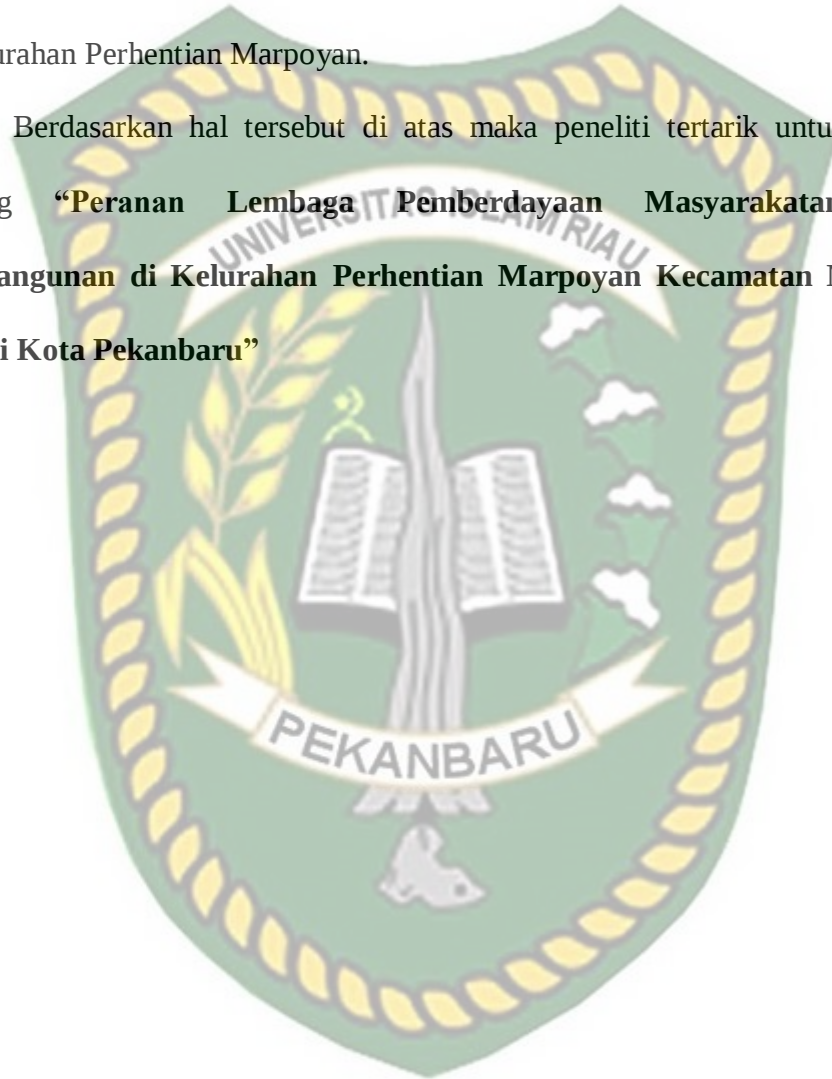
Tika mengemukakan bahwa ada sembilan peranan kepemimpinan seseorang dalam organisasi yaitu pemimpin sebagai pembuat kebijakan, pemimpin sebagai ahli, pemimpin sebagai pelaksana, pemimpin sebagai pengendali, pemimpin sebagai pemberi hadiah atau hukuman, pemimpin sebagai teladan dan lambang atau simbol, pemimpin sebagai tempat menimpakan segala kesalahan, dan pemimpin sebagai pengganti peran anggota lain.⁸

Kurang maksimalnya peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam hal ini menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat LPM di kelurahan Perhentian Marpoyan belum menjalankan perannya

⁸ Tika H. Moh. Pabundu, Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan, cetakan pertama. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2006. hal 46

sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai penggerak dalam pembangunan, Pihak LPM juga kurang maksimal dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat karena berdasarkan pengamatan bahwa LPM kurang proaktif terhadap pembangunan fisik di kelurahan Perhentian Marpoyan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru”**



1.2. Identifikasi Masalah

Perlunya dilakukan peningkatan Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perhentian Marpoyan dalam pembangunan di kelurahan Perhentian Marpoyan, Meningkatkan aspirasi masyarakat untuk bersama-sama dalam pembangunan, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada pembangunan di Kelurahan Perhentian Marpoyan, Sehingga harus adanya pertemuan atau rapat yang bersinambungan untuk menyatukan pandangan dalam pembangunan di Kelurahan Perhentian Marpoyan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang diangkat dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru?
2. Apa Faktor Penghambat Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru?

1.4. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah penelitian ini adalah peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada perencanaan pembangunan di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menggambarkan Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam Perencanaan pembangunan di kelurahan Perhentian Marpoyan kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam Perencanaan pembangunan di kelurahan Perhentian Marpoyan kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada masalah peranan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.
- b. Secara Praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat menjadi suatu bahan masukan bagi Pemerintah Kelurahan Perhentian Marpoyan agar peranan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan dapat terlaksana dengan baik.
- c. Secara Akademis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi perbandingan dan bahan acuan bagi penelitian berikutnya.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Menurut Mardalis yang dimaksud dengan studi kepustakaan dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, adalah teori mengenai variable-variabel permasalahan yang akan diteliti.⁹ Dengan dikemukakannya teori dalam studi kepustakaan akan dapat membantu peneliti dan orang lain untuk memperjelas sasaran dan tujuan peneliti yang dilakukan.

Tinjauan pustaka penelitian memiliki arti yaitu peninjauan kembali pustaka-pustaka mengenai permasalahan (*review of related literatur*). Sesuai dengan arti itu, sebuah tinjauan pustaka penelitian memiliki fungsi sebagai peninjauan kembali (*review*) pustaka (laporan penelitian dan lain-lain) mengenai masalah yang berkaitan, dan tidak selalu harus cocok identik dengan bidang masalah yang sedang dihadapi, namun termasuk juga yang seiring serta berkaitan (*collateral*). Tinjauan pustaka atau disebut juga (*literatur review*) dalam penelitian merupakan landasan teori sebagai konsep dan generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian landasan penelitian perlu ditegakan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*). Adanya landasan teori ini merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data.¹⁰

⁹ Mardalis. 2003. Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal). Bumi Aksara: Jakarta.

¹⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung, 2008, Alfabeta). hal. 52

Penelitian ini memasuki ruang fungsi-fungsi pemerintahan sebagaimana diungkapkan oleh Taliziduhu ndraha bahwa terdapat tiga fungsi yakni fungsi pembangunan, pemberdayaan dan fungsi pelayanan. Fungsi adalah apasaja kegiatan pemerintah. Fungsi pembangunan juga merupakan bagian integral dari pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan itu sendiri dilakukan secara istimewa, supaya jasa publik yang dialami dirasakan atau dinikmati oleh konsumen, terjangkau semurah mungkin dan semudah mungkin pada saat diperlukan. Fungsi pemberdayaan dari pemerintah adalah apasaja yang dilakukan dengan tujuan memanusiakan manusia. Memberikan ruang kekuatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menggunakan produk pemerintahan yang berupa pelayanan. Fungsi pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan pemerintah yang meliputi dua sisi, yaitu pelayanan civil dan pelayanan publik. Pelayan civil meliputi pengakuan terhadap hak asasi manusia, penghargaan terhadap kemanusiaan, perlindungan dan penyelamatan terhadap jiwa manusia dan harta bendanya, dan penerapan nilai-nilai kemanusiaan. Disebut pelayanan publik yakni pelayanan yang melibatkan kepentingan orang banyak atau masyarakat.

Sebagai pedoman dan acuan berfikir penulis dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini, Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

2.1. Konsep Pemerintahan

Secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut:

- a. Mendapat awalan “pe” menjadi kata “pemerintah” berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara.
- b. Mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan” berarti perihal, cara perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

Di dalam kata dasar “perintah” paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak, yaitu yang memerintah disebut pemerintah dan pihak yang diperintah disebut rakyat.
- b. Pihak yang memerintah memiliki wewenang dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyatnya.
- c. Pihak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah (dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah “sami’na wa atha’na atau sam’an wa tha’atan”).
- d. Antara pihak memerintah dengan pihak yang diperintah terdapat hubungan timbal balik secara vertikal maupun horizontal¹¹

Apabila dalam suatu negara kekuasaan pemerintahan, dibagi atau dipisahkan maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dengan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi

¹¹ Syafiie, Inu Kencana. 2003. SANRI. Bumi Aksara: Jakarta.

lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislatif) dan yang melaksanakan akan peradilan (disebut yudikatif).¹²

Menurut Awang dan Wijaya mendefinisikan bahwa pemerintah adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi dan hukum dalam sebuah negara, pemerintah adalah organ yang berwenang dan memproses pelayanan publik, baik warga negara asing maupun siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah di wilayah Indonesia.¹³

Menurut Mahfud pemerintahan dalam arti luas didefinisikan sebagai seluruh organ kekuasaan didalam Negara, yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Bahkan dalam arti luas pemerintahan diartikan sebagai pelaksana tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang untuk mencapai tujuan Negara. Tetapi dalam arti yang sempit pemerintah hanya mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan (Eksekutif) yang bisa dilakukan kabinet dan aparat-aparatnya dari tingkat pusat sampai kedaerah.¹⁴

Syafiie menyimpulkan bahwa pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam mengkoordinasikan, antara departemen dan unit dalam tubuh

¹² Ibid.

¹³ Awang, Azam dan Wijaya Mendara. Ekologi Pemerintahan. Pekanbaru: Alaf Riau. 2012. Hal 6

¹⁴ Moh, Mahfud MD. 2001. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Rineka Cipta: Jakarta. Hal 66

pemerintahan itu sendiri.¹⁵

Hubungan antara yang memerintah dan di perintah itulah yang menjadi objek pemerintahan, karena dalam hubungan-hubungan tersebut akan ditemui berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan. Ilmu pemerintahan mempelajari pemerintah dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya (sehingga dapat diterima oleh yang bersangkutan pada saat dibutuhkan) jadi normatif ideal, dan yang kedua dari sudut senyatanya pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak, jadi empirik.

Pemerintahan sebagai suatu aktifitas, proses dan institusi yang berbentuk atas dasar kesepakatan warga negara adalah pencerminan dari harapan, kebutuhan, dan keinginan warga negara untuk mewujudkan hidup bersama yang tertib dan maju, agar setiap orang dapat menjalani kehidupannya secara nyaman dan wajar. Pemerintahan dalam konteks hidup bersama setiap individu diharapkan dapat membantu mereka mewujudkan keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidup mereka, apapun nilai dan kriteria yang mereka gunakan. Sedangkan secara teoritis dan filosofis, keberadaan suatu pemerintahan sebagai sebuah realita hidup manusia telah dipahami dengan perspektif dan pandangan.

Dalam rangka untuk menjaga keseimbangan menjalankan roda pemerintahan maka lahirlah teori kekuasaan yang dikenal dengan teori *Trias Politica* yang dikemukakan oleh Montesquie yaitu kekuasaan legislatif artinya kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang, kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan mengadili

¹⁵ Syafiie, Inu Kencana. 2011, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Bandung, PT. Refika Aditama.

pelanggaran terhadap undang-undang yang dalam hal ini juga dikenal dengan istilah *Separation Of Power* antara ketiga lembaga tersebut. Namun di Indonesia konsep *Trias Politica* dengan pandangan *Separation Of Power* tidak dapat dilaksanakan secara murni. Hal ini dibuktikan dengan keterkaitan hubungan kerjasama antara legislatif dan eksekutif dalam membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan, sehingga lembaga ini merupakan mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan guna dalam rangka pencapaian tujuan negara. Dimana lembaga legislatif merupakan salah satu simbol atau tanda suatu pemerintahan yang bersifat demokrasi, karena lembaga legislatif merupakan perwakilan dari masyarakat atau rakyat di pemerintahan. Dengan ikut sertanya masyarakat dalam pemerintahan sudah cukup menjelaskan bahwa pemerintahan tersebut dijalankan secara demokrasi dan bertanggung jawab kepada rakyat melalui lembaga legislatif.

Ilmu pemerintahan menurut Brasz dalam Syafiie mengemukakan bahwa maksudnya ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan di fungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.¹⁶

Menurut Kansil Agar ketatalaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat terselenggara dengan baik maka perlu diperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya, yakni 6 :

1. Didasarkan pada kebijaksanaan yang berlaku
2. Kejelasan wewenang, tugas, dan tanggungjawab setiap aparatur yang terlibat
3. Prinsip koordinasi

¹⁶ Syafiie, Inu Kencana. 2011, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Bandung, PT. Refika Aditama.

4. Tertulis
5. Dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan
6. Kesederhanaan/tidak berbelit-belit.¹⁷

Menurut Ndraha ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan yang bersangkutan.

Ilmu pemerintahan mempelajari dari dua sudut, pertama dari sudut sebagaimana seharusnya, (“sehingga dapat diterima oleh yang bersangkutan pada saat yang dibutuhkan,” jadi normatif, ideal, das solen), dan kedua dari sudut bagaimana senyatanya (“pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan’, apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak, jadi empirik, das sein). Berdasarkan definisi itu terdapat dikonstruksikan ruang lingkup Ilmu Pemerintahan. Ruang lingkup itu terdiri dari:

- a. Yang diperintah
- b. Tuntutan yang diperintah (jasa-publik dari layanan-civil)
- c. Pemerintah
- d. Kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah
- e. Hubungan pemerintah
- f. Pemerintah yang bagaimana yang dianggap mampu menggunakan kewenangan menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawab.
- e. Bagaiman supaya kinerja pemerintahan sesuai dengan tuntutan yang

¹⁷ Kansil, dan Christine. 2003. Sistem Pemerintahan Indonesia. Bumi Aksara. Jakarta. Hal 189

diperintahkan perubahan zaman.¹⁸

2.2. Konsep Pemerintah

Menurut Ndraha Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan ini, bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia maka berhak menerima layanan civil tertentu, dan pemerintah wajib melayaninya.¹⁹

Ndraha mengatakan, fungsi pemerintah, yang pertama fungsi primer dan kedua fungsi sekunder. Fungsi primer yaitu yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah. Artinya fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan social masyarakat, semakin meningkat kondisi yang diperintah semakin meningkat kondisi primer yang diperintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai *provider* jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan sipil termasuk layanan birokrasi yang disingkat sebagai fungsi pelayanan (*serving*). Sedangkan fungsi sekunder pemerintah adalah fungsi yang berhubungan negatif dengan fungsi ekonomi, politik dan sosial yang diperintah dalam arti semakin tinggi taraf hidup, semakin kuat bargaining position, dan semakin integratif masyarakat yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah.

Ada dua fungsi pemerintah yang dijelaskan oleh teori di atas, yaitu fungsi

¹⁸ Ndraha, Talaziduhu. 2011. Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru. Rineka Cipta: Jakarta.

¹⁹ Talaziduhu Ndraha, Kybernologi Ilmu Pemerintahan, (Jakarta, Rineka Cipta, 2011), hlm 6.

primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer erat kaitannya fungsi pelayanan yang tidak dapat diprivatisasikan atau diserahkan kepada organisasi swasta, fungsi primer hanya dapat dilaksanakan oleh pemerintah melalui pelayanan sipil dan pelayanan birokrasi serta meningkatkan kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat. Kemudian, fungsi sekunder merupakan fungsi sebaliknya, yaitu fungsi yang bersifat negatif maksudnya dengan dilaksanakannya fungsi ekonomi, politik dan sosial maka berdampak semakin kuatnya bargaining position yang mengakibatkan pembaharuan masyarakat yang diperintah.

Ensiklopedi Nasional Indonesia memberikan terminologi pemerintah dalam dua sisi pengertian, yaitu dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. Pengertian sempit pemerintah diartikan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, sedangkan dalam artian luas pemerintah adalah seluruh lembaga dan kegiatannya dalam suatu negara, termasuk hal hal yang berhubungan dengan legislatif dan yudikatif.²⁰

Pemerintah secara umum dalam Maulidiah adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi oleh masyarakat untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah. Sehingga unsur utama pemerintah tersebut adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi dalam bentuk wewenang untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang dalam hal ini adalah penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, pelayanan kemasyarakatan dan pemberdayaan, sehingga pemerintah memiliki fungsi dasar yakni pelayanan.²¹

²⁰ Farid, A., Andi S. A., Studi Kebijakan pemerintah, (Bandung, Refika Aditama, 2012) hlm 3

²¹ Sri Maulidiah, Pelayanan Publik (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan), (Bandung, Indra Prahasta, 2014), hal 1-2

Secara etimologis, Leo Fonseka (1999:1) membedakan kata government dengan governance, ia berpendapat bahwa istilah government menunjukan suatu unit politik yang menjalankan fungsi pembuatan kebijakan, bukan fungsi administrasi (pelaksanaan) kebijakan. Kata governance menunjukan tanggung-jawab menyeluruh terhadap keduanya yaitu fungsi politik dan fungsi administratif. Karena itu, istilah government dan governance walaupun mempunyai arti yang sama yakni pemerintahan, namun berbeda dalam cakupannya. Governance lebih luas cakupannya dari pada government.²²

Menurut Apeldoore dalam Supriyanto “pemerintah” sekurang-kurangnya memiliki tiga pengertian seperti yang dicatat Utrech sebagai berikut:

- a. Pemerintah sebagai gabungan semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah dalam arti kata luas. Jadi, yang meliputi badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintah dalam pengertian ini disebut penguasa;
- b. Pemerintah sebagai badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah diwilayah suatu Negara. Dalam hal ini presiden, perdana menteri dan lain-lain;
- c. Pemerintah sebagai organ eksekutif, dalam artian kepala Negara bersama-sama dengan menteri-mentrinya.²³

2.3. Pelayanan Publik

Menurut kotler dalam Sampara Lukman pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk fisik, sedangkan kata publik berasal dari Bahasa Inggris yaitu *public* yang berarti umum, masyarakat,

²² Dadang Sufianto, Etika Pemerintahan Di Indonesia, (Bandung, Alfabeta, 2016), hlm 12-13

²³ Budi Supriyanto, Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategi), (Tangerang, CV Media Berlian, 2009), hlm 22-23

negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi publik yang berarti umum, orang banyak, ramai.²⁴

1. Reliability (kehandalan) yaitu kemampuan memberikan pelayanan kepada pelanggan sesuai dengan yang di harapkan, seperti kemampuan dalam menepati janji, kemampuan memecahkan masalah dan kemampuan untuk meminimumkan kesalahan.
2. Responsiveness (daya tanggap) yaitu sebagai sikap tanggap, mau mendengarkan dan merespon pelanggan dalam upaya memuaskan pelanggan.
3. Assurance (jaminan) yaitu kemampuan pegawai dalam menimbulkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat melalui pengetahuan, kesopanan serta menghargai perasaan masyarakat, keterampilan dalam memberikan informasi, kemampuan dalam memberikan keamanan di dalam memanfaatkan jasa yang ditawarkan.
4. Emphaty (empati) yaitu kemampuan atau kesediaan karyawan memberikan perhatian yang bersifat pribadi, seperti bersikap ramah, memahami kebutuhan dan peduli kepada pelanggannya.

2.4. Manajemen

Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua

²⁴ Prof. Dr. Lijan Poltak Sinambela dkk, *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), hal. 4-5

sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.²⁵

Manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan planing, organizing, actuating, dan controlling dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara beruntun dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.

Manajemen suatu konsep tata pimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakkan orang-orang dan pengerahan fasilitas kerja agar tujuan kerja sama benar-benar tercapai.

Dalam mengartikan dan mendefinisikan manajemen ada berbagai ragam, ada yang mengartikan dengan ketatalaksanaan, manajemen pengurusan dan lain sebagainya. Bila dilihat dari literatur-literatur yang ada, pengertian manajemen menurut Manulang dapat dilihat dari tiga pengertian :

1. Manajemen sebagai suatu proses
2. Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia
3. Manajemen sebagai ilmu (science) dan sebagai seni (art)

Manajemen sebagai suatu proses, melihat bagaimana cara orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Pengertian manajemen sebagai suatu proses dapat dilihat dari pengertian menurut :

1. Encyclopedia of the social science, yaitu suatu proses dimana pelaksanaan suatu tujuan tertentu dilaksanakan dan diawasi.

²⁵ Stoner, 1996;7 (dalam Zulkifli dan Moris) 2014. Zulkifli & Moris Adidi, Yogya, 2014. *Fungsi-fungsi Manajemen*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru, Hlm. 17

2. Haiman, manajemen yaitu suatu fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain, mengawasi usaha-usaha yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan.
3. George R. Terry, yaitu cara pencapaian tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan melalui kegiatan orang lain.

Manajemen suatu kolektivitas yaitu merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kolektivitas atau kumpulan orang-orang inilah yang disebut dengan manajemen, sedangkan orang yang bertanggungjawab terhadap terlaksananya suatu tujuan atau berjalannya aktivitas manajemen disebut manajer.

Manajemen sebagai suatu ilmu dan seni, melihat bagaimana aktivitas manajemen dihubungkan dengan prinsip-prinsip dari manajemen. Pengertian manajemen sebagai suatu ilmu dan seni dari:

1. Chaster 1 Bernard dalam bukunya yang berjudul The function of the executive, bahwa manajemen yaitu seni dan ilmu, juga Henry Fayol, Alfin Brown Harold, Koontz Cyril O'donnel dan George R Terry.
2. Marry Parker Follett menyatakan bahwa manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen yaitu koordinasi semua sumberdaya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan terlebih dahulu.²⁶

1. Tujuan organisasional yang telah ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berkompeten.
2. Fungsi yaitu perencanaan usaha untuk penetapan *output* dan *outcome* yang dikehendaki, pengorganisasian sumber-sumber agar siap pakai/siap gerak, penggerakan atau penggunaan sumber-sumber guna menghasilkan *output* dan *outcome* yang dihasilkan atau dinikmati konsumen sesuai dengan *output/outcome* yang diharapkan.
3. Siklus produk yang berawal dari consumer dan setelah melalui beberapa rute, berakhir pada consumer.

Pengertian manajemen pemerintahan sekitar 4 atau 5 tahun lalu, dilingkungan Badan Diklat Departement Dalam Negeri dibentuk sebuah pusat baru yang disebut pusat pembinaan manajemen pemerintahan. Defenisi manajemen pemerintahan dalam hubungan itu terlihat melalui ruang lingkup materi pokok kurikulumnya :

1. Asas dan Sistem Pemerintahan.
2. Hukum tata pemerintahan.
3. Ekologi pemerintahan.
4. Filsafat dan etika pemerintahan.
5. Praktik penyelenggaraan pemerintahan.
6. Kepemimpinan pemerintahan.
7. Reformasi pembangunan daerah.

Istilah manajemen datang dari bahasa Inggris *management*. Istilah ini terbentuk dari akar kata *manus*, tangan, yang berkaitan dengan kata *menagerie* yang berarti beternak. *Menagerie* juga berarti sekumpulan binatang liar yang dikendalikan di dalam pagar. Kata *manus* berkaitan dengan kata *menage* yang berasal dari bahasa Latin *mansionaticum* yang berarti pengelolaan rumah besar. Manajemen mempelajari bagaimana menciptakan *effectiveness* usaha (“doing right things”) secara *efficient* (“doing right things”) dan produktif, melalui

²⁶ Zulkifli dan Nurmasari, Pengantar Manajemen, (Pekanbaru, Marpoyan Tujuh, 2015) hlm 4-5

fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan. Jadi unsur-unsur manajemen adalah:

- a. **Tujuan** organisasional yang telah ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berkompeten.
- b. **Fungsi**, yaitu perencanaan usaha termasuk penetapan output dan outcome yang dikehendaki, pengorganisasian sumber-sumber agar siap pakai/gerak penggerakan/penggunaan sumber-sumber guna menghasilkan output dan kontrol penggerakan/penggunaan sumber-sumber supaya output dan outcome yang dihasilkan/dinikmati konsumen sesuai dengan output/outcome yang diharapkan.
- c. **Siklus** produk yang berawal dari konsumen, dan setelah melalui beberapa rute, berakhir pada konsumen.²⁷

Sedangkan manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang untuk menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen terdiri dari enam unsur (6M) yaitu : *men, money, methode, materials, machines, dan market.*

²⁷ Ndraha, Talaziduhu. 2011. Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru. Rineka Cipta: Jakarta.

Unsur *man* (manusia) ini berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut manajemen sumber daya manusia atau disingkat dengan MSDM yang merupakan terjemahan dari *man power management*. Manajemen yang mengatur unsur manusia ini ada yang menyebutnya manajemen kepegawaian atau manajemen personalia (*personnel management*).

Menurut Sondang P. Siagian, Manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan demikian, dapat pula dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari pada administrasi, karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama dari pada administrasi.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu organisasi atau perusahaan, disamping faktor lain seperti aktiva dan modal. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam perusahaan yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia.

Aktifitas berarti melakukan berbagai kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengarahan, analisis jabatan, rekrutmen dan sebagainya. Secara etimologi manajemen sumber daya manusia merupakan penggabungan dua konsep yang secara maknawiyah memiliki pengertian yang berbeda. Kedua konsep adalah manajemen dan sumberdaya manusia.

Sumber daya organisasi secara garis besar dapat dibedakan kedalam dua kelompok, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Sumber daya

manusia meliputi semua orang yang berstatus sebagai anggota didalam organisasi yang masing-masing memiliki peran dan fungsi. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang yang meliputi potensi fisik dan non fisik. Sedangkan sumberdaya manusia dalam konteks organisasi publik dipahami sebagai potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seorang pegawai yang terdiri atas potensi fisik dan potensi non fisik.

Sumberdaya non manusia terdiri atas sumber daya alam, modal, mesin, teknologi, material dan lain-lain. Kedua kategori sumber daya tersebut sama-sama pentingnya, tetapi sumber daya manusia merupakan faktor dominan, karena satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, karsa, kebutuhan, pengetahuan, keterampilan, motivasi, karya dan prestasi dan lain sebagainya.

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan. Unsur Manajemen Sumber Daya Manusia adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan. Dengan demikian, fokus yang dipelajari Manajemen Sumber Daya Manusia ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja.

Dengan demikian, sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam sebuah organisasi, tanpa adanya sumber daya manusia maka akan berkurang efektifnya kinerja dari sebuah organisasi. Tetapi sumber daya manusia juga perlu dilatih agar lebih terampil dalam melakukan fungsi didalam *job*-nya.

2.5. Konsep Kepemimpinan

Kepemimpinan biasanya diartikan sebagai kekuatan untuk menggerakkan orang dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan hanyalah sebuah alat, sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara suka rela. Berkaitan dengan kesediaan orang lain mengikuti keinginan pemimpin, di sini dikemukakan ada beberapa kekuatan (kekuasaan) yang mesti dimiliki pemimpin itu agar orang yang digerakkan tersebut mengikuti keinginannya, yaitu berupa ancaman, penghargaan, otoritas, dan bujukan.²⁸

Pemimpin pada hakikatnya adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahan sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Menurut Stone, semakin banyak jumlah sumber kekuasaan yang tersedia bagi pemimpin, akan makin besar potensi kepemimpinan yang efektif. Jenis pemimpin ini bermacam-macam, ada pemimpin formal, yaitu yang terjadi karena pemimpin bersandar pada wewenang formal. Ada pula pemimpin nonformal, yaitu terjadi karena pemimpin tanpa wewenang formal berhasil mempengaruhi perilaku orang lain.²⁹

2.6. Konsep Pembangunan

Pembangunan berbasis masyarakat, secara sederhana dapat diartikan sebagai pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat, direncanakan, dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan sebesar-besarnya memanfaatkan potensi

²⁸ Nurkholis, Manajemen Berbasis Sekolah; Teori, Model, dan Aplikasi, Jakarta: Grasindo, 2003, hlm. 153.

²⁹ Fattah, Nanang, Landasan Manajemen Pendidikan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013, hlm. 88

sumber daya (alam, manusia, kelembagaan, nilai-nilai social budaya, dll.) yang ada dan dapat diakses oleh masyarakat setempat. Karena itu, pembangunan berbasis masyarakat seharusnya pembangunan berangkat dari kebutuhan masyarakat dan bukannya dirumuskan oleh “orang luar” atau elit masyarakat yang merasa tahu dan lebih pandai untuk merumuskan pembangunan yang cocok bagi masyarakatnya³⁰. Dalam buku Nurman Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana.³¹

Todaro mengutip pendapat Goulet (1971) dan tokoh-tokoh lainnya yang mengatakan bahwa paling tidak ada tiga komponen dasar atau nilai inti yang harus dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami pembangunan yang paling hakiki. Ketiga komponen dasar tersebut adalah :

Kecukupan (sustenance)

Jati diri (self-esteem)

Kebebasan (freedom)

Ketiga hal inilah yang merupakan tujuan pokok yang harus dicapai oleh setiap orang dan masyarakat melalui pembangunan. Ketiganya berkaitan secara langsung dengan kebutuhan-kebutuhan manusia yang paling mendasar, yang terwujud dalam berbagai macam manifestasi (bentuk) di hampir semua masyarakat dan budaya sepanjang zaman.³²

Pembangunan merupakan suatu proses atau rangkaian kegiatan yang tidak pernah kenal berhenti, untuk terus menerus mewujudkan perubahan-perubahan

³⁰ Aprillia Theresia, Krisnha dkk. 2015. Pembangunan Berbasis Masyarakat, Alfabeta, Bandung.

³¹ Nurman. Strategi Pembangunan daerah, Rajawali Pers, Jakarta. 2015.

³² Nurman. Strategi Pembangunan daerah, Rajawali Pers, Jakarta. 2015.

dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai perbaikan mutu-hidup, dalam situasi lingkungan kehidupan yang juga terus menerus mengalami perubahan-perubahan. Meskipun demikian, di dalam praktik, perencanaan pembangunan senantiasa memiliki batas waktu yang tegas, tetapi batasan-batasan itu pada hakikatnya hanyalah merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk menghadapi kondisi yang terjadi pada selang waktu yang sama, untuk kemudian terus dilanjutkan dengan tahapan-tahapan berikutnya yang juga dimaksudkan untuk terus memperbaiki mutu hidup masyarakat (dan individu-individu di dalamnya) dalam suasana perubahan lingkungan yang akan terjadi pada selang waktu tertentu.

Upaya-upaya untuk tercapainya kenaikan kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun masyarakat luas, dalam pengertian sehari-hari seringkali disebut sebagai upaya “pembangunan”.

Pembangunan merupakan segala upaya yang terus menerus ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik, atau untuk memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Proses pembangunan yang terjadi, bukanlah sesuatu yang sifatnya alami atau “given”, melainkan suatu proses yang dilaksanakan dengan sadar dan terencana. Artinya, pembangunan tersebut dilaksanakan melalui suatu proses perencanaan terlebih dahulu, untuk menganalisis masalah-masalah atau kebutuhan-kebutuhan yang (akan) harus dipenuhi, tujuan-tujuan yang ditetapkan atau yang hendak dicapai, alternatif pencapaian tujuan dan pengambilan keputusan tentang cara-cara mencapai tujuan yang terpilih, dengan senantiasa mempertimbangkan: kekuatan, kelemahan, peluang, dan resiko, yang harus dihadapi.

Mengenai definisi tentang istilah pembangunan itu sendiri, Riyadi mengungkapkan adanya beragam rumusan yang dikemukakan oleh banyak pihak, namun kesemuanya itu mengarah kepada ke suatu kesepakatan bahwa: Pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat (dan individu-individu di dalamnya) yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu.³³

Proses perubahan yang akan dilaksanakan dan ingin dicapai dalam setiap pembangunan, adalah perubahan yang menyeluruh yang mencakup beragam aspek dan tatanan kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Ginjar Kartasmita (2001)³⁴ dalam buku Nurman mengemukakan bahwa manajemen pembangunan adalah bagian dari manajemen publik dengan ciri-ciri yang khas. Untuk analisis manajemen pembangunan dikenali beberapa Fungsi yang cukup nyata, yakni :

1. Perencanaan
2. Pengerahan (mobilisasi) sumber daya
3. Pengerahan (menggerakkan) partisipasi
4. Penganggaran
5. Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah
6. Koordinasi
7. Pemantauan dan evaluasi, dan
8. Pengawasan

³³ Riyadi & Dedy Supriyady Bratakusumah (2004) Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam mewujudkan otonomi daerah, PT Gramedia Pustaka utama Jakarta.

³⁴ Nurman. Strategi Pembangunan daerah, Rajawali Pers, Jakarta. 2015.

2.7. Pemerintah Kelurahan

Dalam Pasal 1 s.d 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2005 mengemukakan bahwa kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kerja kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan. Sementara itu dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.73 Tahun 2005 mengemukakan bahwa :

- a. Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
- b. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota melalui camat.
- c. Lurah diangkat oleh walikota/bupati atas usul camat dari pegawai negeri sipil
- d. Syarat-syarat lurah meliputi.
 1. Pangkat/golongan minimal penata (III c)
 2. Masa kerja minimal 10 tahun
 3. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami keadaan sosial budaya masyarakat setempat.

Pemerintah kelurahan perlu memiliki kemandirian dan akuntabilitas public yang cukup memadai, dengan interaksinya yang bersifat langsung dengan masyarakat diwilayah kerjanya. Sebagai unit pelaksana pemerintah yang terendah dibawah kecamatan, jenis-jenis pelayanan yang dapat dikoordinasikan penyelenggaraannya oleh lurah adalah beragam dengan kriteria yang mencakup pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. Pembentukan sebagai unit pemerintahan terkecil dibawah kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah melalui analisis potensi daerah, beban kerja daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, responsifitas, fleksibilitas, rasionalitas, tentang kendali dan akuntabilitas.

Dengan demikian, meskipun dekonsentrasi (desentralisasi administrasi) dan devolusi (desentralisasi politik) sama-sama merupakan varian dari desentralisasi, tetapi ketika diterapkan sebagai asas dalam mendudukkan tugas dan fungsi camat mempunyai implikasi yang berbeda terhadap kebijakan, kewenangan dan diskresi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.

Merujuk pada konsepsinya, desentralisasi politik atau devolusi berarti pendelegasian sebagian wewenang dan tanggung jawab untuk membuat keputusan dan pengendalian atas sumber-sumber daya kepada instansi pemerintah regional yang memiliki lembaga perwakilan dan memiliki kekuasaan pemerintahan.

Devolusi mempunyai karakteristik dasar (1) pemerintah setempat (lokal) bersifat otonom sebagai tingkatan yang terpisah dimana penggunaan kewenangan pusat kurang atau tidak langsung, (2) pemerintah setempat memiliki batas yang jelas dan diakui secara sah dimana mereka memiliki kekuasaan dan menyelenggarakan fungsi-fungsi publik, (3) pemerintah setempat berkedudukan sebagai badan hukum dan memiliki kekuasaan untuk menjamin sumber daya untuk menyelenggarakan fungsinya, (4) pemerintah setempat adalah institusi yang menyediakan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat setempat dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi dalam masalah-masalah setempat, (5) hubungan timbal balik kental, saling menguntungkan dan koordinatif antara pemerintah pusat dan pemerintah setempat.

Prinsip diatas berlaku juga untuk level kelurahan yang memiliki kewenangan desentralisasi politik, yang membuat kelurahan leluasa merumuskan kebijakan atau diskresi demi kesejahteraan rakyat di wilayahnya. Kebijakan,

kewenangan dan diskresi lurah memiliki otoritas untuk mengelola sumber daya demi menjamin laju pembangunan di wilayahnya.

2.8. Lembaga Kemasyarakatan

Tujuan pembentukan suatu lembaga kemasyarakatan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan merupakan sendi-sendi utama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Konsep gotong royong menurut Koenjaraningrat (1985:61)³⁵ adalah: “Sejarah konsepnya gotong-royong tolong menolong, yang mula-mula hanya berwujud sebagai suatu sistem pengerahan tenaga tambahan pada masa-masa sibuk dalam produksi bercocok tanam, sebagai sistem tolong menolong antara tetangga dan kerabat dalam kesibukan-kesibukan sekitar rumah tangga, waktu berpesta dan pada peristiwa-peristiwa kematian dan bencana, dijadikan satu dengan sistem rodi itu? Rupa- rupanya, sejarahnya mulai pada waktu Panitia Persiapan Kemerdekaan dalam zaman Jepang, mengangkat konsep itu menjadi suatu unsur yang amat penting dalam rangkaian prinsip- prinsip dasar dari Negara”.

Menggerakkan Swadaya dan gotong royong masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk menggerakkan swadaya gotong royong dengan menghimbau masyarakat untuk aktif dan menyumbangkan pikiran, biaya dan waktu untuk kegiatan gotong royong.³⁶

Oleh karena itu nilai-nilai yang terkandung dalam gotong royong tersebut

³⁵ Koenjaraningrat. 1985. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Gramedia. Jakarta

³⁶ Khotami. Evaluasi Pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi. 2018

sangat membantu dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, maka dirasakan perlu untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai gotong royong tersebut dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Lembaga kemasyarakatan dalam bahasa Inggris adalah social institution yaitu sebagai himpunan norma-norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan juga dapat dikatakan sebagai himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok didalam kehidupan masyarakat. Wujud yang kongkrit lembaga kemasyarakatan tersebut adalah asosiasi (Asosiation).

Lembaga kemasyarakatan kelurahan yang oleh masyarakat setempat dan diberikan tugas-tugas dan kewajiban yang bersifat tertentu yang masing-masing lembaga kemasyarakatan kelurahan yang merupakan suatu kumpulan penduduk yang berdiam dalam suatu lokasi tertentu dalam suatu kelurahan yang berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung diantara mereka, kumpulan penduduk ini dibentuk penduduk itu sendiri dengan musyawarah, serta diakui dan dibina pemerintah daerah.

Pada umumnya lembaga-lembaga masyarakat terdiri atas lembaga formal dan nonformal. Lembaga masyarakat yang bersifat formal ialah lembaga didirikan atau disponsori oleh pemerintah dan mungkin dibiayai oleh pemerintah (pusat, daerah dan desa). Lembaga nonformal ialah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, berdasarkan inisiatif masyarakat sendiri, atau kelompok warga tertentu, dan pembiayaan atau dananya diperoleh melalui hasil swadaya masyarakat

bersangkutan. Nurcholis dalam Rauf dan Rahyunir menyatakan bahwa, ‘dalam kehidupan masyarakat desa telah dikenal dengan beberapa lembaga formal yang dibentuk oleh pemerintah, antara lain :

1. Lembaga politik/administrasi dengan membentuk organisasi RT/RW
2. Lembaga pendidikan untuk kesejahteraan keluarga dengan membentuk organisasi
3. Lembaga ekonomi dengan membentuk Organisasi Koperasi Unit Desa (KUD), kelompok tani dan arisan desa wisma pada setiap RT
4. Lembaga pengaturan air dengan membentuk organisasi Usaha Tirta
5. Lembaga keamanan dengan membentuk Hansip (Pertahanan Sipil) Wabra (Perlawanan Rakyat Semesta), dan sistem keamanan lingkungan (Siskamling)
6. Lembaga kependudukan dengan gerakan Keluarga Berencana (KB)
7. Lembaga kesehatan dengan Gerakan Kesehatan Masyarakat, Gerakan Kesejahteraan Ibu dan Anak dan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)
8. Lembaga kepemudaan : KNPI, Karang Taruna, Kader Pembangunan Desa, dan lain-lain.

Lembaga nonformal yang dibentuk oleh masyarakat sendiri sangat banyak antaralain :

1. Lembaga kekeluargaan, misalnya, ikatan wangsa atau keluarga besar, ikatan suku dan ikatan marga

2. Lembaga sosial. Misalnya, perkumpulan warga untuk membantu warga masyarakat yang menghadapi musibah, kematian dan perkawinan dengan cara arisan atau jimpitan
3. Lembaga pendidikan. Misalnya, pondok pesantren, taman pendidikan Al-qur'an, panti asuhan, pendidikan keterampilan/montir/tukang kayu/listrik, dan sebagainya
4. Lembaga olah raga. Misalnya, perkumpulan pencak silat, sepak bola, voli, bulu tangkis dan lain-lain
5. Lembaga seni dan budaya. Misalnya, perkumpulan orkes gambus, orkes keroncong, perkumpulan kerawitan, dan sebagainya Lembaga adat. Misalnya, majlis adat batak dan lain-lain.³⁷

Lembaga kemasyarakatan merupakan salah satu wujud dari struktur perantara yang ada di Indonesia. Di satu sisi masyarakat memerlukan adanya unsur perantara dengan pemerintah dan di sisi yang lain pemerintah juga perlu adanya unsur perantara dengan masyarakat, sehingga keberadaan lembaga kemasyarakatan sama-sama dibutuhkan, baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Peranan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas lurah meliputi; membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pembangunan, membantu lurah dalam pelaksanaan urusan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan.

Lembaga kemasyarakatan memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan

³⁷ Rahyunir Rauf & Yusri Munaf, Op.Cit, hlm 60-61

bermasyarakat, diantaranya terdiri dari memberikan berbagai bentuk pedoman dan petunjuk kepada masyarakat atau bagaimana masyarakat bersikap dalam menghadapi berbagai masalah yang terus ada dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, menjaga berbagai keutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, dan memberikan pegangan dalam sistem pengendalian sosial yang ada di masyarakat, bahkan sampai pada fungsi pengawasan baik terhadap tingkah laku masyarakat maupun pengawasan terhadap tingkah laku pemerintah setempat.

Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka keterlibatan masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dibuka lebih luas, sehingga di kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan, Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 73 Tahun 2005 dinyatakan; di kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan. Sedangkan pada pasal 10 ayat (2) dinyatakan bahwa pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah mufakat.

Musyawarah mufakat dihadiri wakil-wakil masyarakat, seperti diatur dalam penjelasan pasal 10 ayat (2); musyawarah mufakat dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat yang terdiri dari pengurus lembaga kemasyarakatan, pemuka masyarakat yang jumlahnya proporsional dari jumlah kepala keluarga.

Lembaga kemasyarakatan kelurahan merupakan Lembaga bentukan masyarakat bukan bentukan pemerintah, dan pembentukannya harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah kelurahan, serta menjadi mitra bagi lurah dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat.

Membantu tugas Lurah yang dimaksud dalam pasal di atas dalam bentuk

membantu pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, seperti yang diatur dalam penjelasan Pasal 11 PP Nomor 73 Tahun 2005; yang dimaksud dengan membantu dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan dan pelayanan social kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat adalah membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.

Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Program pembinaan kelurahan adalah suatu usaha-usaha jangka panjang yang mempunyai tujuan meningkatkan pembangunan pada suatu sektor tertentu untuk mencapai beberapa kegiatan kelurahan. Program juga dapat

dipahami sebagai kegiatan sosial yang teratur mempunyai tujuan yang jelas dan khusus serta dibatasi oleh tempat dan waktu tertentu, program pembinaan lurah kepada Lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana yang ada di kelurahan. Peranan lembaga kemasyarakatan yang paling banyak membantu tugas lurah adalah lembaga Rukun Tetangga, lembaga Rukun Warga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, lembaga Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, lembaga Karang Taruna, dan lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya, dikarenakan lembaga Rukun Tetangga juga di tugaskan dengan tugas-tugas umum lainnya yang diberikan pemerintah,

pemerintah provinsi, dan pemerintah kota.

Sejarah Lembaga kemasyarakatan kelurahan memiliki latar belakang berbeda-beda, tetapi sama dalam peran yakni membantu tugas pemerintah dibidang pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan berperan serta dalam membantu tugas pemerintah.³⁸

Pengertian lembaga kemasyarakatan menurut dua ahli yaitu:

- a. Menurut Koentjaraningrat lembaga kemasyarakatan adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan khusus dalam kehidupan manusia.³⁹
- b. Menurut Soerjono Soekanto lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat.⁴⁰

Pada dasarnya lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi antara lain:

- a. Memberikan pedoman bagi anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan.
- b. Menjaga keutuhan masyarakat.

³⁸ Rauf, Rahyunir. Studi Perkembangan Lembaga Kemasyarakatan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi. 2018

³⁹ Koenjaraningrat. 1985. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Gramedia. Jakarta

⁴⁰ Soekanto, Soerjono. 2017. Sosiologi Suatu Pengantar. Edisi Revisi, Cetakan ke 48, Raja Grafindo, Jakarta.

- c. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota- anggotanya.⁴¹

Lembaga kemasyarakatan berfungsi sebagai pedoman perilaku atau sikap tindakan manusia dan merupakan salah satu sarana untuk memelihara dan mengembangkan integritas di dalam masyarakat, namun demikian tidak semua norma di dalam masyarakat dengan sendirinya menjadi bagian dari suatu lembaga sosial tertentu, hal ini tergantung pada proses pelebagaan dari norma-norma tersebut sehingga menjadi bagian dari suatu lembaga sosial tertentu.⁴²

Bagi Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) diharapkan dalam menjalankan tugasnya bekerja dengan efektif dan efisien sehingga tujuan yang ingin dicapai yaitu memberdayakan masyarakat khususnya dalam bentuk pembangunan maupun dalam pencarian dana untuk pembangunan tersebut sehingga dapat terlaksana dengan baik dan lancar.⁴³

2.9. Konsep Koordinasi

Manusia adalah makhluk sosial dan Organisasional. ia tidak dapat hidup sendiri tanpa koordinasi. Koordinasi selalu diperlukan dalam setiap organisasi kecil maupun organisasi besar baik dalam organisasi yang sederhana maupun yang

⁴¹ Soekanto, Soerjono. 2017. Sosiologi Suatu Pengantar. Edisi Revisi, Cetakan ke 48, Raja Grafindo, Jakarta.

⁴² Soleman B. Taneko. 1984. Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi pembangunan. Jakarta: Rajawali

⁴³ Syaprianto, Prihatin, Panca Setyo. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarkat dalam Membantu Kepala Desa menyusun Rencana Pembangunan Desa. Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi. 2018

kompleks, dalam mencapai tujuan organisasi selalu ada saja hal-hal yang saling berkaitan.

Menurut Ndraha koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama-sama-mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain, keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusak keberhasilan kegiatan yang lain.⁴⁴

Menurut G.R. Terry, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.⁴⁵

Selanjutnya syarat-syarat koordinasi yang baik menurut Koontz dalam Manullang adalah sebagai berikut:

1. Adanya Perencanaan

Adanya Perencanaan dan pelaksanaan yang efektif dan memberi bantuan untuk mencapai koordinasi dan prosedur.

2. Adanya Pembagian Kerja

Adanya Pembagian Kerja dan hubungan kerja antara kelompok dalam bentuk kerjasama.

3. Adanya Komunikasi

Adanya hubungan Komunikasi yang baik antara pemimpin dengan staf sun-

⁴⁴ Ndraha, Talaziduhu. 2011. Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru. Rineka Cipta: Jakarta.

⁴⁵ Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h. 85

sub pembagian organisasi suatu instansi.

4. Adanya Pertemuan

Adanya Pertemuan melalui rapat antar kelompok-kelompok untuk membahas dan memecahkan masalah yang dihadapi.⁴⁶

Manfaat koordinasi yaitu sebagai berikut :

1. Menciptakan keseimbangan tugas maupun hak antara setiap bagian dalam organisasi maupun antara setiap anggota dalam bagian-bagian tersebut.
2. Mengingatkan setiap anggota bahwa mereka bekerja untuk tujuan bersama, sehingga tujuan-tujuan individu yang bertentangan dengan tujuan bersama tersebut dapat dihilangkan.
3. Menciptakan efisiensi yang tinggi. Pekerjaan-pekerjaan yang terkoordinasi akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari pada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan tanpa koordinasi
4. Menciptakan suasana kerja yang rukun, damai, dan menyenangkan. Para anggota saling menghargai satu sama lain karena mereka sadar bahwa mereka bekerja sama untuk kepentingan bersama.⁴⁷

Tujuan koordinasi yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya sasaran perusahaan
2. Untuk menjuruskan keterampilan spesialis ke arah sasaran perusahaan
3. Untuk menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan
4. Untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran

⁴⁶ Manullang, M., Dasar-dasar Manajemen, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2006.

⁴⁷ Irene Diana Sari Wijayanti, *Manajemen*, (Yogyakarta: Mitra Cendikia, 2008). hal. 13

5. Untuk mengintegrasikan tindakan kearah sasaran organisasi atau perusahaan
6. Untuk menghindari tindakan *overlapping* dari sasaran perusahaan.⁴⁸

2.10. Konsep Peranan

Dalam kamus bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran adalah :

- a. Peran adalah pemain yang diandalkan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan.
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.⁴⁹

Menurut Ndraha Peranan diartikan suatu sebagian perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator di setiap jenjang pemerintahan.⁵⁰

Biddle dan Tomas membagi peristilahan teori peran dalam empat golongan, yaitu:

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku.
- d. Kaitan antara orang dalam perilaku.⁵¹

⁴⁸ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hal. 88

⁴⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. hal 854

⁵⁰ Ndraha, Talaziduhu. 2011. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru*. Rineka Cipta: Jakarta.

⁵¹ Sarlito, Wirawan Sarwono, *teori-teori psikologi sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers 2015), hal. 215

Lebih lanjut dinyatakan Levinson dalam Soekanto (2017:211)⁵² peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*Social position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Marion J. dalam Soekanto (2017:213)⁵³ menyatakan bahwa pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu- individu dalam masyarakat penting untuk hal-hal berikut:

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan, apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan tersebut seyogyanya diletakkan pada individu- individu yang oleh

⁵² Soekanto, Soerjono, 2017, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Revisi, Cetakan ke 48, Raja Grafindo, Jakarta.

⁵³ Soekanto, Soerjono, 2017, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Revisi, Cetakan ke 48.

masyarakat dianggap mampu melaksanakannya, maka harus terlebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat melaksanakannya.

- c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, karena pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi terlalu banyak.
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, maka belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan oleh seseorang dalam membawa perannya. Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya. Dalam berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, pengembangan dan pengaturan masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hal-hal serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan.

Dari penjelasan di atas kita mengetahui bahwa peran dan status sosial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Adapun konsep peran menurut

Sukanto adalah sebagai berikut:⁵⁴

1. Persepsi Peran

Persepsi Peran adalah pandangan kita terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi ini berdasarkan interpretasi atas sesuatu yang diyakini tentang bagaimana seharusnya kita berperilaku.

2. Ekspektasi Peran

Ekspektasi peran merupakan sesuatu yang telah diyakini orang lain bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Sebagian besar perilaku seseorang ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks dimana orang tersebut bertindak.

3. Konflik Peran

Saat seseorang berhadapan dengan ekspektasi peran yang berbeda, maka akan menghasilkan konflik peran. Konflik ini akan muncul saat seseorang menyadari bahwa syarat satu peran lebih berat untuk dipenuhi ketimbang peran lain.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto, dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti

⁵⁴ Soekanto, 2012. *Sosiologi sebagai pengantar*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.213

pengurus, pejabat dan lain sebagainya

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Kemudian menurut Fadli dalam Kozier Barbara Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.⁵⁵

Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peran dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat karena peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan, tergambar bahwa peranan menyangkut pelaksanaan sebuah tanggung jawab seseorang atau organisasi untuk berprakarsa

⁵⁵ Aris Wahyu Setiawan, 2016. *Peran Pegawai dalam Pelayanan Pembuatan Paspor*, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 4, Nomor 1, hal. 117

dalam tugas dan fungsinya

2.11. Ulasan Karya

Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian terdahulu yang memperkuat Sebagai perbandingan. Adapun penelitian terdahulu dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel II.1. : Penelitian terdahulu mengenai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

No	Nama	Tahun	Lokasi	Judul
1	Khotami	2018	Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	Evaluasi Pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
2	Delfa Hariyadi	2017	Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis kabupaten Bengkalis	Peranan kepala Desa dalam Koordinasi Pembangunan di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis kabupaten Bengkalis

Sumber: Pengolahan data tahun 2019

Sisi persamaan dengan penelitian Penulis adalah penelitian yang pertama dalam hal peranan LPM, Penelitian kedua sama-sama meneliti tentang LPM dan yang ketiga dalam hal peranan.

Dan sisi perbedaanya adalah Penulis meneliti tentang Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam pembangunan sedangkan Syaprianto dan Panca Setyo Prihatin tentang Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Membantu Kepala Desa menyusun Rencana Pembangunan Desa, Khotami tentang Evaluasi Pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Delfa Hariyadi tentang Peran kepala Desa dalam Koordinasi Pembangunan.

2.12. Kerangka Pemikiran

Ada beberapa hal pokok yang menjadi kerangka pikir dalam penelitian yang akan dilakukan, untuk mengetahui bagaimana alur berpikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian maka dibuatlah kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru



Sumber Data : Modifikasi Penulis Tahun 2019.

2.13. Konsep Operasional

Untuk memudahkan pemberian pemahaman dalam menafsirkan istilah ataupun konsep terkait penelitian ini, maka penelitian ini memberikan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini:

1. Peranan adalah suatu upaya atau kemampuan maupun perilaku yang harus

dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perhentian Marpoyan agar dapat menggerakkan, menumbuhkan rasa kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2. LPMK adalah Lembaga Kemasyarakatan memiliki salah satu fungsi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Pembangunan Kelurahan adalah suatu proses perubahan dan perbaikan yang dilaksanakan sudah terencana dan terarah dari suatu keadaan yang kurang baik menuju keadaan yang lebih baik yang ada berlangsung di Kelurahan.
4. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
5. Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekumpulan manusia yang bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan tertentu.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian Kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada dilapangan tentang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di kelurahan Perhentian Marpoyan kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru.

Penelitian deskriptif-kualitatif bermaksud membuat pemerian (penyandaran) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati⁵⁶. Penelitian kualitatif bertujuan menggali dan membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna dibalik realita⁵⁷.

Menurut Arikunto⁵⁸ bahwa penelitian deskriptif-kualitatif biasanya merupakan penelitian non-hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan/menguji hipotesis. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta atau data akan tetapi tidak melakukan pengujian suatu hipotesis.

⁵⁶ Moleong, 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Redoskarya: Bandung.

⁵⁷ Bungin, B.M., 2010. Penelitian Kualitatif. PT.Kencana: Jakarta.

⁵⁸ Arikunto, 2000. Prosedur Penelitian. Rineka Cipta: Jakarta.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan dengan focus penelitian di kelurahan Perhentian Marpoyan kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dengan karakteristik cukup dinamis. Adapun alasan peneliti menempatkan Kelurahan Perhentian Marpoyan sebagai studi penelitian ini adalah karena Perhentian Marpoyan merupakan kelurahan yang baru dibentuk/dipecahkan dari Kelurahan Maharatu pada tahun 2017

3.3. Sumber Informan

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mengedepankan penyelidikan secara mendalam terhadap objek penelitian sehingga membutuhkan informasi-informasi yang bersumber dari para informan yang mengetahui secara langsung, mengetahui dan terlibat langsung maupun mempunyai pengaruh dalam penelitian.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

1. Lurah Perhentian Marpoyan
2. Kasi Pembangunan
3. Ketua LPMK Perhentian Marpoyan
4. Ketua Rukun Warga Kelurahan Perhentian Marpoyan
5. Masyarakat Kelurahan Perhentian Marpoyan

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiyono, 2016:224).⁵⁹ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di wawancarai dimintai pendapat dan ide-idenya.

2. Observasi (Penelitian lapangan)

Observasi adalah suatu metode atau cara untuk menganalisis dan melakukan pencatatan yang dilakukan secara sistematis, tidak hanya terbatas dari orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film dan sebagainya. Studi

⁵⁹ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet. 2016

dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan peneliti adalah teknik analisis data kualitatif dimana data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diwawancarai. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk mendapatkan penjelasan mengenai peranan Lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kelurahan perhentian marpoyan.

Kemudian data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan mulai sejak awal sampai sepanjang proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian kualitatif tidak ada panduan buku untuk melakukan analisis data, namun secara umum dalam analisis data selalu ada komponen-komponen yang wajib harus ada seperti pengambilan data, kategori data, dan kesimpulan.

3.6. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.1 Jadwal dan waktu penelitian tentang Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

No	Keterangan	Tahun 2019/Bulan/Minggu																			
		Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Penyusunan Proposal																				
3	Perbaikan proposal																				
4	Seminar Proposal																				
5	Penelitian Lapangan																				
6	Penulisan Tesis																				
7	Perbaikan Tesis																				

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan

penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar.

Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :

- SK Kerajaan Bersluit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
- Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.
- Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
- Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.
- UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
- UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
- UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
- Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.
- UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
- UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

4.1.2. Demografi Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota di Provinsi Riau dengan ibu kotanya adalah Pekanbaru. Kota tersebut sekaligus merupakan kedudukan dari ibu kota Provinsi Riau sendiri. Kota Pekanbaru diperintah oleh seorang Walikota yang memerintah wilayah administrasi pemerintahan dengan luas wilayah berdasarkan Permendagri No.66 Tahun 2011 adalah seluas 632,27 km² dan dengan jumlah penduduk sebanyak 769.497 jiwa. Secara administratif Kota Pekanbaru memiliki 12 daerah kecamatan dan 58 daerah kelurahan.

Kota Pekanbaru memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Pekanbaru memiliki 83 Kelurahan pada 12 (dua belas) Kecamatan yang ada di Kot Pekanbaru;

1. Kecamatan Tampan,
2. Kecamatan Marpoyan Damai,
3. Kecamatan Bukit Raya,
4. Kecamatan Tenayan Raya,
5. Kecamatan Payung Sekaki,
6. Kecamatan Senapelan,
7. Kecamatan Sukajadi,
8. Kecamatan Sail,
9. Kecamatan Limapuluh,
10. Kecamatan Rumbai,
11. Kecamatan Rumbai Pesisir.

Kota Pekanbaru berada pada posisi koordinat $0.4815278^{\circ}\text{LU}$ $101.468675^{\circ}\text{BT}$.

Pekanbaru termasuk kota perdagangan dan jasa yang memiliki tingkat urbanisasi yang cukup tinggi dari daerah-daerah di Provinsi Riau. Kota ini juga mendapatkan julukan sebagai kota seribu ruko karena di sepanjang kota ditemukan banyak sekali ruko sebagai pusat aktivitas kegiatan berdagang dan bisnis masyarakat. Untuk sarana transportasi, Pekanbaru memiliki beberapa jalur akses diantaranya adalah satu bandar udara internasional yakni Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II untuk

jalur udara, Terminal Bus Bandar Raya Payung Sekaki untuk jalur darat dan Pelabuhan Pelita Pantai dan Sungai Duku untuk akses jalur perairan.

Pekanbaru memiliki posisi yang sangat strategis, berada pada jalur Lintas Timur Pulau Sumatera serta terhubung dengan beberapa kota penting di Sumatera seperti Kota Medan, Padang dan Jambi. Kota Pekanbaru dialiri oleh Sungai Siak sebagai sungai terdalam di Indonesia. Sungai Siak mengalir Pekanbaru dari arah barat ke timur dan berada pada posisi 5-50 m di atas permukaan laut. Pekanbaru beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 34.1 °C sampai 35.6 °C, serta suhu minimum yakni antara 20.2 °C sampai 23.0 °C.

Komposisi etnik terbanyak di Kota Pekanbaru adalah suku Minangkabau, diikuti dengan suku Melayu, Jawa, Batak dan Tionghoa. Dominasi etnik Minangkabau di Kota Pekanbaru telah membuat bahasa utama yang sering digunakan masyarakat Pekanbaru adalah bahasa Minang, diikuti dengan bahasa Melayu, dan bahasa Indonesia. Semenjak tahun 2010, Pekanbaru juga telah dikenal sebagai kota ketiga terpadat penduduknya di Pulau Sumatera setelah Kota Medan dan Palembang. Agama Islam merupakan agama utama yang dianut oleh penduduk Pekanbaru. Agama lain yang juga dianut masyarakat Pekanbaru diantaranya adalah Kristen, Katolik, Budha, Konghucu dan agama Hindu.

Kota pekanbaru merupakan ibukota provinsi riau yang mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai ibukota provinsi sebagaiberikut :

Tabel IV.1. Jarak Pekanbaru Dengan Kota-Kota Lain Sebagai Ibu Kota Provinsi.

Pekanbaru	Taluk kuantan	= 118 Km	Ket
	Rengat	= 159 Km	
	Tembilahan	= 21,3,5 Km	
	Kerinci	= 33,5 Km	
	Siak	= 74,5 Km	
	Bangkinang	= 51 Km	
	Pasir pangaraian	= 132,5 Km	
	Bengkalis	= 128 Km	
	Bagansiapiapi	= 192,5 Km	
	Dumai	= 125 Km	

Sumber : Pekanbaru Dalam Angka 2014

4.1.3. Pekanbaru Sebagai Ibu Kota Propinsi Riau

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru.

Dan pada tahun 1958, Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen. Sebelumnya Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibu kota propinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6. Untuk menanggapi maksud surat kawat tersebut, dengan penuh pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia Khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No. 21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau.

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah di Riau untuk mendengar pendapat pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambil ketetapan bahwa kota Pekanbaru terpilih sebagai ibukota Propinsi Riau. Keputusan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des 52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau sekaligus Pekanbaru memperoleh status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Untuk merealisasi ketetapan tersebut, pemerintah pusat membentuk Panitia Interdepartemental, karena pemindahan ibukota dari Tanjungpinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. Sebagai pelaksana di daerah dibentuk suatu badan di Pekanbaru yang diketuai oleh Penguasa Perang Riau Daratan Letkol. Kaharuddin Nasution.

Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan sejumlah bangunan dalam waktu singkat agar dapat menampung pemindahan kantor dan pegawai dari Tanjungpinang ke Pekanbaru. Sementara persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Panpres No. 6/1959 sekaligus direalisasi.

Gubernur Propinsi Riau Mr.S.M. Amin digantikan oleh Letkol Kaharuddin Nasution yang dilantik digedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru tanggal 6 Januari 1960.

4.1.4. Sejarah Kecamatan Marpoyan Damai

Sejarah singkat dari kantor camat marpoyan damai, dimana kecamatan marpoyan damai terbentuk pada tahun 2003 atas pemekaran yang terjadi antara kecamatan tampan dan kecamatan sukajadi. Terjadi pemekaran ini disebabkan untuk mempermudah warga atau masyarakat menyelesaikan berbagai macam administrasi seperti: pembuatan surat-surat tanah, surat pengantar untuk surat nikah, dll. Dari kecamatan tampan dan sukajadi yang sudah melampaui batas-batas warga atau masyarakat yang terlalu banyak, yang membuat para para warga atau masyarakat untuk melakukan pengurusan surat-suratnya terlalu jauh, penyelesaian yang lama, ngantri yang lama. Membuat warga atau masyarakat yang ingin mengurus surat-surat kekantor camat mengurungkan niatnya karena dari hal-hal diatas.

Setelah terjadi pemekaran pada tahun 2003 letak kecamatan marpoyan damai terletak di jalan sudirman dengan menyewa gedung, akan tetapi masih dibantu oleh kecamatan tampan atas apa saja yang harusnya dikerjakan oleh kecamatan marpoyan damai dikarenakan saat itu kecamatan marpoyan damai masih terjadi masa transisi. Pada saat itu camat yang memimpin kecamatan marpoyan damai adalah Edi Satria tetapi tidak terlalu lama hanya satu tahun jabatan yang di pegangnya Pada tahun 2004 lokasi kecamatan marpoyan damai pindah kembali di jalan arifin ahmad dengan menyewa gedung juga. Yang sudah mulai mengerjakan tugas-tugasnya sendiri walaupun masih dibantu oleh kecamatan tampan dikarenakan file-file data yang sebagian besar masih ada di tempat kecamatan tampan dan pada tahun 2004 itu pun bertepatan dengan pemilihan calon legislatif

dan pemilihan presiden dengan yang mengerjakan tugas penghitungan suara masih di lakukan oleh kecamatan tampan. Camat yang memimpin kecamatan marpoyan damai pada tahun 2004 sampai tahun 2007, dibawah pimpinan ibrahim tambusai, MH. Dan pada masa jabatan 2004 sampai tahun 2007 dilakukan pencarian lahan sekaligus pembuatan gedung milik sendiri oleh camat dan beberapa orang lainnya yang membantu dalam pencarian lahannya.

Pada tahun 2007 kecamatan marpoyan damai sudah menggunakan gedung milik sendiri dan gedung kecamatan marpoyan damai sudah di buka (disahkan) oleh walikota pekanbaru yaitu Herman Abdullah, MM. Pada tanggal 1 maret 2007, lokasi gedung ini di jalan arifin ahmad, dasar hukum yang mendasari gedung milik sendiri ini adalah: PP No. 19 tahun 1987, nomor kode wilayahnya : 021 kode pos nya adalah: 28294 serta luas wilayah kecamatan marpoyan damai adalah : 2978,25.

Batas-batas wilayah :

- Utara : Kecamatan Payung Sekaki & Sukajadi
- Selatan : Kecamatan Tampan
- Barat : Kecamatan Tampan & Payung Sekaki
- Timur : Kecamatan Bukit Raya & Sail

Kecamatan Marpoyan Damai terdiri dari beberapa kelurahan yang diantaranya sebagai berikut:

- Sidomulyo timur
- Maharatu
- Wonorejo
- Tangkerang barat

➤ Tangkerang tengah

Ada beberapa orang yang pernah menduduki sebagai camat dari kecamatan marpoyan damai yang dari 2007 sampai sekarang ini diantara nya adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2. Camat Marpoyan Damai dari 2007.

No	Nama	Masa Jabatan
1	Azwan S.sos	2007
2	Damsal	2007-2008
3	Irma novrita	2012
4	Akmalwadi S.sos	2013
5	Budi darman S.stp	2014
6	Fiora Helmi SSTP.,M.Ec,Dev	2015-2019
7	Damai Junaedy S.Sos., M.Si	2019-Sekarang

4.1.5. Profil Pemerintahan Kelurahan Perhentian Marpoyan

Kelurahan Perhentian Marpoyan memiliki luas 4,34 kilometer persegi, atau 15 persen dari luas Kecamatan Marpoyan Damai, di Kelurahan Perhentian Marpoyan terdapat sebanyak 53 RT dan 11 RW, dengan jumlah rumah tangga 4.715 Kepala Keluarga (KK). Adapun jumlah penduduk Kelurahan Perhentian Marpoyan sebanyak 20.139 jiwa, yang terdiri dari 9.669 laki-laki dan 10.470 perempuan.

Kelurahan Perhentian Marpoyan merupakan kelurahan baru sejak tahun 2016.

Pemekaran ini sesuai peraturan daerah (Perda) Nomor 4/2016 yang sudah disahkan DPRD. Bahwa ada penambahan 25 Kelurahan dari tujuh Kecamatan. Berikut nama-nama Kelurahan pemekaran dari tujuh Kecamatan,

- Kecamatan Bukit Raya
 1. Kelurahan Airdingin (pemekaran dari Kelurahan Simpang Tiga)
- Kecamatan Marpoyan Damai
 2. Kelurahan Perhentian Marpoyan (pemekaran Kelurahan Maharatu dan Kelurahan Sidomulyo Timur)
- Kecamatan Payung Sekaki
 3. Kelurahan Sungai Sibam (pemekaran dari Kelurahan Air Hitam)
 4. Kelurahan Bandarraya (pemekaran dari Kelurahan Labuh Baru Barat)
 5. Kelurahan Tirta Siak (pemekaran dari Kelurahan Tampan)
- Kecamatan Rumbai
 6. Kelurahan Agrowisata (pemekaran dari Kelurahan Palas)
 7. Kelurahan Maharani (pemekaran dari Kelurahan Palas)
 8. Kelurahan Rantau Panjang (pemekaran dari Rumbai Bukit)
 9. Kelurahan Muara Fajar Barat (pemekaran dari Kelurahan Muara Fajar Timur)
- Kecamatan Rumbai Pesisir
 10. Kelurahan Sungai Ambang (pemekaran dari Kelurahan Lembah Damai)
 11. Kelurahan Sungai Ukai (pemekaran dari Kelurahan Lembah Sari dan Kelurahan Tebing Tinggi Okura)
- Kecamatan Tampan
 12. Kelurahan Tobek Godang (pemekaran dari Kelurahan Delima)
 13. Kelurahan Air Putih (pemekaran dari Kelurahan Simpang Baru)

14. Kelurahan Bina Widya (pemekaran dari Kelurahan Simpang Baru)
15. Kelurahan Buah Madani (pemekaran dari Kelurahan Simpang Baru)
16. Kelurahan Sialang Munggu (pemekaran dari Kelurahan Buah Karya dan Kelurahan Sidomulyo Barat)

- Kecamatan Tenayan Raya
 17. Kelurahan Mentangor (pemekaran dari Kelurahan Kulim)
 18. Kelurahan Sialang Rampai (pemekaran dari Kelurahan Kulim)
 19. Kelurahan Pebatuan (pemekaran dari Kelurahan Kulim)
 20. Kelurahan Bambu Kuning (pemekaran dari Kelurahan Kulim)
 21. Kelurahan Industri Tenayan (pemekaran dari Kelurahan Rejosari)
 22. Kelurahan Melebung (pemekaran dari Kelurahan Rejosari)
 23. Kelurahan Bencah Lesung (pemekaran dari Kelurahan Rejosari)
 24. Kelurahan Buah Negeri (pemekaran dari Kelurahan Rejosari)
 25. Kelurahan Pematang Kapau (pemekaran dari Kelurahan Tangkerang Timur dan Kelurahan Sialang Sakti)

Adapun tujuan pemekaran kelurahan ini ialah bertujuan untuk meningkatkan Pelayanan publik dan meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dalam pelayanan terhadap Masyarakat serta untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan, sehingga dapat mempercepat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.1.6. Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan (LPMK, PKK, RT/RW dan Karang Taruna).

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
4. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
5. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
6. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

2. Tim Penggerak PKK

Tim Penggerak PKK kelurahan mempunyai tugas membantu pemerintah Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Tugas tim penggerak PKK kelurahan meliputi :

1. Menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan basil rakerda kabupaten/kota;
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang disepakati;
3. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK dusun/lingkungan, RW, RT dan desa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
4. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
5. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
6. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
7. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
8. Membuat laporan hasil kegiatan kepada tim penggerak PKK kecamatan dengan tembusan kepada ketua dewan penyantun tim penggerak PKK setempat;
9. Melaksanakan tertib administrasi; dan
10. Mengadakan konsultasi dengan ketua dewan penyantun tim penggerak PKK setempat.

Tim penggerak PKK kelurahan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

3. RT dan RW

RT/RW mempunyai tugas membantu pemerintah lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. RT/RW dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

1. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
2. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antara warga;
3. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
4. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

4. karang Taruna

Karang taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya. Karang taruna dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi

1. Penyelenggara Usaha Kesejahteraan Sosial.

2. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bagi masyarakat.
3. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda secara komprehensif, terpacu dan terarah serta berkesinambungan.
4. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya.
5. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda.

4.2. Hasil Penelitian

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat (LPM) adalah lembaga, organisasi atau wadah yang di bentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Sebelum di sebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dahulu disebut Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Tujuan dibentuknya lembaga ini adalah untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara partisipatif.

Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Peran menurut Soekanto (2001:242), dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lain sebagainya

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Yang dimaksud dengan peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memegang status atau kedudukan tertentu.

Berdasarkan Pemendagri No 18 tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan. Pasal 5 Lembaga Kemasyarakatan memiliki fungsi: a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan merupakan salah satu wujud dari struktur perantara yang ada di Indonesia. Di satu sisi masyarakat memerlukan adanya unsur perantara dengan pemerintah dan di sisi yang lain pemerintah juga perlu adanya unsur perantara dengan masyarakat, sehingga keberadaan lembaga kemasyarakatan sama- sama dibutuhkan, baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah.

Peranan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas lurah meliputi; membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pembangunan, membantu lurah dalam pelaksanaan urusan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan.

Secara umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat menyiapkan sarana seperti penyediaan:

1. Kotak saran

Dalam upaya mempermudah, menampung segala aspirasi, keluhan maupun saran dari masyarakat, pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) menggunakan pola penyediaan kotak saran atau pengaduan. Kotak saran merupakan tempat menampung surat berupa usulan dan saran bagi masyarakat. Dengan adanya kotak saran diharapkan agar masyarakat juga mau menyampaikan aspirasinya terhadap pelayanan dan pembangunan di Kelurahan. Langkah ini merupakan bentuk komitmen kelurahan untuk menyukseskan program pembangunan di kelurahan. Setiap aspirasi masyarakat maupun keluhan dari warga masyarakat melalui kotak saran tersebut akan ditampung oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan diperhatikan sebagaimana mestinya. Meskipun kotak saran yang akan disediakan bersifat terbuka kepada masyarakat secara luas, namun warga yang menyampaikan keluhan- keluhan maupun saran akan dirahasiakan identitasnya.

2. Kuesioner

Kuesioner merupakan daftar yang berisi pertanyaan- pertanyaan yang dijawab dan dikerjakan oleh responden. Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pertanyaan yang diajukan. Dengan adanya kuesioner responden mudah dalam memberikan jawaban, karena jawaban telah tersedia akan membutuhkan waktu yang singkat dalam menjawabnya. Tujuan kuesioner yaitu untuk memperoleh data yang relevan sesuai dengan yang akan dicapai. Kuesioner yang dibuat juga untuk memecahkan masalah penelitian. Maka dari itu kuesioner yang dibuat harus menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh masyarakat agar masyarakat mudah dalam menjawab kuesioner yang diberikan. Dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dilakukan melalui cara membagikan kuesioner kepada masyarakat setiap lingkungan dan kemudian masyarakat akan diberikan arahan cara mengisi kuesioner yang diberikan.

3. Rapat

Salah satu bentuk menampung aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dengan mengadakan rapat Bersama.

Dimensi utama dalam penelitian ini diarahkan kepada peran aktif, peran pasif dan peran partisipatif menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Perhentian Marpoyan.

4.2.1. Peran aktif menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakan pada suatu organisasi. Hal ini dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi. Dalam hal ini peran aktif LPM menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan di kelurahan Perhentian Marpoyan.

Dari pernyataan di atas, adapun keterangan-keterangan yang peneliti dapatkan sebagai berikut :

• Lurah Perhentian Marpoyan

Untuk lebih jelas dan mendapatkan jawaban yang sesuai dengan kondisi empiris dilapangan, peneliti bertanya kepada Lurah Perhentian Marpoyan tentang bagaimana peran aktif LPM menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan. Berdasarkan wawancara dengan Lurah Perhentian marpoyan, beliau mengatakan mengenai menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat adalah kewajiban kita baik dari kelurahan maupun dari lembaga kemasyarakatan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Lurah pada saat wawancara di ruangannya, kantor Kelurahan :

“Mengenai Peran aktif LPM menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan ini merupakan tanggung jawab kita bersama karna adalah kesepakatan kita bersama untuk menjalankannya kita juga butuh kerjasama, apalagi dalam sinergitas pembangunan maka ketika ditanya Peran LPM dalam membantu Lurah terhadap pembangunan Kelurahan, tetapi disini LPM setiap kali rapat mengenai RPJM Cenderung menyerahkan semua keputusan kepada kami selaku Lurah.”

Lebih lanjut peneliti bertanya mengenai apa permasalahan yang terjadi

berkenaan dengan peran aktif LPM menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan. Beliau menjawab :

“Sebagai Lurah kami memberikan ruang untuk LPM dalam hal memberikan masukan untuk kemajuan kelurahan termasuk penyampaian aspirasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan Perhentian Marpoyan, jadi tidak ada hambatan dalam hal tersebut.”

Bentuk Peran aktif menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dapat diserap dari sarana yang telah disediakan seperti kisioner, kotak saran dan rapat yang diadakan.

• **Kasi Pembangunan Kelurahan Perhentian Marpoyan**

Kemudian menurut pendapat Kasi pembangunan Kelurahan Perhentian Marpoyan mengenai peran aktif LPM menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sudah jadi keharusan bagi LPM untuk melakukan itu, sehingga apa yang diinginkan masyarakat dapat kita tampung dan kita realisasikan sesuai dengan yang kita harapkan bersama.

“Rancangan Pembangunan Menengah baik dalam pembahasan rapat maupun saat realisasi program pembangunan menurut kami pihak LPM sudah cukup berperan aktif karena LPM ikut sesuai proses perencanaan”.

Selanjutnya mengenai hambatan LPM menyalurkan aspirasi masyarakat beliau menjawab :

“Mungkin mengenai hambatan bisa dikatakan tidak ada, lebih tepatnya kurang intensifnya komunikasi LPM dengan pihak kelurahan dalam mengkomunikasikan hal apa saja yang menjadi problem dan keinginan-keinginan masyarakat”

Dari keterangan di atas pihak Kelurahan Perhentian Marpoyan membuka diri untuk memberi ruang menampung, berkoordinasi dalam menjawab apa-apa saja yang menjadi harapan masyarakat.

•Ketua LPM Kelurahan Perhentian Marpoyan

Selanjutnya wawancara dengan Ketua LPM Kelurahan Perhentian marpoyan Mengenai peran aktif LPM menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, kami telah memberikan sarana terhadap masyarakat mengenai keinginan-keinginan dalam bentuk aspirasi masyarakat yang dibahas dalam rapat bersama Ketua RW.

”Kami LPM memberikan sarana ke pada masyarakat dalam bentuk kuisoner, kotak saran dan rapat yang diadakan untuk menyerap aspirasi masyarakat, sehingga kami dpat mengkoordinasikan ke pihak kelurahan mengenai hal apa-apa saja yg menjadi aspirasi masyarakat.”

Mengenai problem dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, beliau menjawab :

“Yang menjadi problem dalam hal itu adalah kurangnya partisipasi masyarakat dlam menyampaikan apirasinya, padahal kami telah memberi sarana dalam penyampaian aspirasi”

Melihat dari pernyataan diatas kurangnya penyerapan aspirasi masyarakat sehingga terjadinya rendahnya minat partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

•Ketua Rukun Warga Kelurahan Perhentian Marpoyan

Selanjutnya dengan Ketua RW 1 Pak Junaidi beliau mengatakan dalam peran aktif LPM menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, tidak secara rutin melakukan rapat untuk membahas apa saja yang menjadi aspirasi masyarakat sehingga kurangnya penyerapan aspirasi masyarakat.

“Setelah saya mendapat pengaduan atau saran dari masyarakat mengenai masalah pembangunan yang ada di lingkungan, kemudian saya menyampaikan kepada ketua LPM saat rapat. Saya selaku Ketua RW 1”

Selanjutnya dengan Ketua RW 2 Pak Musliadi sejalan dengan pernyataan Ketua RW 1, bahwa :

“Kami selaku Ketua RW mendapatkan keluhan ataupun aspirasi

masyarakat akan kami sampaikan pada saat rapat bersama LPM untuk bisa di tindak lanjuti, namun rapat yang di adakan kurang intensif.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa masyarakat dalam menyampaikan keluhan yang dialami mengenai masalah pembangunan di kelurahan, mereka mengadukan ke Ketua RW masing-masing. Setelah adanya saran dan pengaduan dari masyarakat, Ketua Rw membawa hasil pengaduan dalam rapat yang dilakukan oleh LPM. Kemudian hasil dari rapat yang dilakukan oleh LPM bersama setiap Ketua RW, ketua LPM berkoordinasi ke kantor kelurahan untuk dapat di tindak lanjuti.

• Masyarakat Kelurahan Perhentian Marpoyan

Berdasarkan wawancara terhadap masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Perhentian Marpoyan, masyarakat cenderung kurangnya memberikan aspirasi terhadap keluhan ataupun keinginan. Sebab kurangnya komunikasi ataupun tindakan penyerapan aspirasi terhap masyarakat, sejalan dengan yang disamapaikan dalam wawancara dengan masyarakat.

Adapun wawancara dengan bapak Zulfikri Sebagai warga RW 1 :

“Saya sebagai masyarakat memiliki keluhan ataupun usulan terhadap kondisi di Kelurahan Perhentian Marpoyan, tapi kurang memahami kepada siapa ha ini tepatnya di sampaikan. Jadi apa yang dirasakan tak pernah tersampaikan atau keinginan untuk usulan dalam hal pembangunan sekalipun ”

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat RW 2 bapak Marzuki :

“Masalah menyalurkan aspirasi, kami sebagai warga memberikan usulan dansaran kepada Ketua RW, setelah itu ketua RW yang memprosesnya ke rapat Bersama LPM.”

Penulis merasa perlu lagi mewawancarai masyarakat lain, maka berikut

hasil wawancara dengan dengan bapak Jonrizal:

“Dalam melihat peran aktif yang dilakukan LPM dalam membantu melaksanakan program pembangunan maka kami melihat LPM menjalankan perannya biasa biasa saja mengikuti apa yang telah ada.”

Dari wawancara dengan warga diatas aspirasi masyarakat kurang terserap sehingga dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak maksimalnya di sebabkan intensitas rapat yang dilakukan LPM dengan Ketua RW di Kelurahan Perhentian Marpoyan.

Berdasarkan dari observasi peneliti di lapangan, memang benar aspirasi masyarakat kurang ditampung disebabkan peran aktif LPM menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang kurang intensif berkoordinasi dengan Ketua RW Kelurahan Perhentian Marpoyan. Sehingga sarana yang disediakan kurang maksimal di manfaatkan.

4.2.2. Peran pasif

Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

Dari pernyataan diatas, adapun keterangan-keterangan yang peneliti dapatkan sebagai berikut :

• Lurah Perhentian Marpoyan

Mengenai peran pasif LPM menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Kelurahan Perhentian Marpoyan. Lurah Perhentian Marpoyan mengatakan LPM memang berperan pasif terhadap aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dilihat dari penyusunan perencanaan pembangunan

LPM cenderung menerima yang telah pihak kelurahan susun untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) menyerahkan keputusan kepada Lurah Perhentian Marpoyan.

4.2.3. Peran partisipatif

Peran Partisipatif wujud dari peran serta dalam aktivitas berupa perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Dalam hal ini tugas dari LPM untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan masyarakat di Kelurahan Perhentian Marpoyan. Dilihat dari pernyataan-pernyataan diatas penulis melihat kurang berperannya LPM meningkatkan dan menampung aspirasi masyarakat jadi kurangnya partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat yang diharapkan.

4.2.4. Peran aktif, Peran pasif dan Peran partisipatif

Menjawab indikator tersebut memberikan pertanyaan mengenai peran aktif, peran pasif dan peran partisipatif di jawab secara bersamaan, berikut hasil dari wawancara yang telah dilakukan sebagai berikut :

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Sekretaris Lurah pada saat wawancara di ruangannya, dengan jawaban :

“untuk persoalan pembangunan untuk peran aktif, peran pasif dan peran partisipatif yang dilakukan LPM dalam membantu maka kami lihat sudah cukup Berperan dalam membantu ya, dengan hadir rapat dalam pembahasan ataupun dengan memberi saran dan masukan.”

Untuk pertanyaan yang sama, peneliti mewawancarai Kasi Pembangunan adapun hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Rancangan Pembangunan Jangka Menengah untuk melihat LPM berperan aktif, berperan pasif maupun berpartisipasi ini, maka kami lihat LPM Sudah Cukup berperan meskipun belum maksimal dalam menjalankan perannya”.

Adapun wawancara dengan dengan Lurah terkait pertanyaan yang sama sebagai berikut :

“kalau kita lihat untuk peran aktif, peran pasif serta peran partisipatif dari LPM membantu dalam pembangunan maka disini saya kira LPM perlu lebih berkoordinasi dengan kami karna bagaimanapun juga kami sebagai pemerintah harusnya LPM lebih intens berkoordinasi dengan kami .”

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat sebagai berikut :

“terkait hal peran LPM dalam membantu Lurah untuk peran aktif ini maka kami selaku masyarakat melihat LPM ya berperan dan dilihat program pembangunan jalan artinya LPM disini berperan dengan baiklah.”

Penulis merasa perlu lagi mewawancarai masyarakat lain maka berikut hasil wawancara dengan masyarakat yang lainnya :

“Dalam melihat peran aktif, peran pasif maupun peran partisipatif yang dilakukan LPM dalam membantu melaksanakan program pembangunan maka kami melihat LPM menjalankan perannya biasa biasa saja mengikuti apa yang telah ada.”

Kemudian penulis ingin melihat hasil wawancara dengan Ketua Rw 2 berikut wawancara tersebut :

“peran LPM dalam membantu Lurah dalam melaksanakan pembangunan disini kami nilai baik sisi peran partisipatif, peran aktif maupun peran pasifnya makanya disini LPM harusnya mempunyai gagasan yang lebih baik untuk perencanaan pembangunan. Disini hanya mengikuti sesuai yang kami sepakati artinya LPM disini sepakat-sepakat saja.”

Selanjutnya dalam kesempatan yang sama penulis melakukan wawancara dengan Ketua RW 1 pada saat wawancara di ruangnya, dengan jawaban :

“untuk persoalan pembangunan untuk peran aktif, peran pasif dan peran partisipatif yang dilakukan LPM dalam membantu Lurah maka kami

lihat sudah cukup Berperan dalam membantu ya, dengan hadir rapat dalam pembahasan ataupun dengan memberi saran dan masukan.”

Untuk pertanyaan yang sama, peneliti mewawancarai Kasi Pembangunan adapun hasil wawancara sebagai berikut :

“Rancangan Pembangunan Jangka Menengah untuk melihat LPM berperan aktif, berperan pasif maupun berpartisipasi sebagai kasi kesra ini maka kami lihat LPM Sudah Cukup berperan meskipun belum maksimal dalam menjalankan perannya.”

Adapun wawancara dengan terkait pertanyaan yang sama sebagai berikut :

“kalau kita lihat untuk peran aktif, peran pasif serta peran partisipatif dari LPM membantu dalam pembangunan maka disini saya kira LPM perlu lebih berkoordinasi dengan kami selaku Ketua RW karna bagaimanapun juga kami sebagai penyalang lidah masyarakat, harusnya LPM lebih intens berkoordinasi dengan kami.”

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat sebagai berikut :

“terkait peran partisipatif, peran aktif dan peran pasif dalam membantu Lurah melaksanakan pembangunan, maka disini kami menilai yang bekerja hanya Lurah saja.”

Penulis merasa perlu lagi mewawancarai masyarakat lain maka berikut hasil wawancara dengan masyarakat yang lainnya :

“dengan jawaban yang sama yang berperan baik peran pasif, peran aktif peran partisipatif disini yang bergerak hanya Lurahnya saja.”

Kemudian penulis ingin melihat hasil wawancara dari masyarakat berikut wawancara tersebut :

“Peran LPM dalam membantu tugas Lurah terhadap pembangunan ditinjau dari sudut pandang indikator peran aktif, peran pasif sama peran partisipatifnya adalah cukup berperan karna memang apa yang di usulkan kami sebagai perangkat LPM setuju saja.”

“persoalan pembangunan terkait LPM berperan apa tidak dalam membantu lurah, bisa dikatakan berperan karna menyetujui daripada program yang dibahas dalam membangun desa.”

Adapun wawancara dengan dengan masyarakat terkait pertanyaan yang sama sebagai berikut :

“kalau kasi kesra yang menilai dilihat unsur-unsur penilaian yang diberikan maka kami menilai LPM belum berperan karna sepanjang ini belum ada koordinasi yang intens dari LPM kepada Lurah.”

Melihat dari hasil wawan cara diatas LPM perlu meningkatkan peran dalam menampung aspirasi masyarakat, sehingga dapat menyalurkan aspirasi masyarakat dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat, dengan demikian masyarakatpun terlibat dalam proses perencanaan pembangunan yang di rencanakan di Kelurahan Perhentian Marpoyan.

Dalam melaksanakan suatu kegiatan pembangunan dibutuhkan sebuah perencanaan yang dimana dalam menentukan perencanaan dibutuhkan partisipasi masyarakat. Ada tiga alasan utama pentingnya melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan yaitu sebagai langkah awal untuk mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi dan merupakan satu cara untuk menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat setempat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan, yang kedua sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan, kondisi, dan sikap masyarakat setempat, serta Masyarakat memperoleh hak untuk „urun rembug‘ dalam menentukan program-program pembangunan yang dilaksanakan.

Agar terciptanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka dibutuhkan komunikasi pembangunan artinya tujuan komunikasi pembangunan bukanlah sekedar untuk memasyarakatkan pembangunan dan menyampaikan

pesan-pesan tentang pembangunan saja tetapi yang lebih penting dalam komunikasi pembangunan yaitu menumbuhkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Melalui komunikasi pembangunan dapat ditempuh untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan ini sangatlah penting, berdasar kan itu hal-hal yang terjadi di lingkungan masyarakat berkenaan dengan pembangunan hendak dapat teratasi dengan cepat jadi perlunya partisipasi masyarakat untuk memberikan asoirasi yang berkenan untuk tujuan pembangunan di Kelurahan Perhentian Marpoyan. Jadi sudah menjadi peran aktif LPM untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyrakat terhadap pembangunan di Kelurahan Perhentian Marpoyan. Untuk itu kepedulian masyarakat sangat dibutuhkan tidak hanya pemerintah setempat yang harus menanggungnya. Kesadaran masyarakat dalam hal ini menjadi penting, karena kesadaran masyarakat adalah proses yang diawali dari adanya rasa memiliki, yaitu rasa memiliki lingkungan sekitar yang akan memicu rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab ini akan menghasilkan kesadaran warga bahwa tugas untuk menjaga lingkungan dan melihat hal-hal yang dibutuhkan utuk pembangunan Kelurahan Perhentian Marpoyan bukan hanya kewajiban pemerintah saja tapi juga warganya.

4.3. Hambatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Membantu Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Perhentian Marpoyan

• Ketua Rukun Warga Kelurahan Perhentian Marpoyan

Ketua RW 1 Pak Junaidi beliau mengatakan dalam peran aktif LPM menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, tidak secara rutin melakukan

rapat untuk membahas apa saja yang menjadi aspirasi masyarakat sehingga kurangnya penyerapan aspirasi masyarakat.

“Setelah saya mendapat pengaduan atau saran dari masyarakat mengenai masalah pembangunan yang ada di lingkungan, kemudian saya menyampaikan kepada ketua LPM saat rapat. Saya selaku Ketua RW 1”

Selanjutnya dengan Ketua RW 2 Pak Musliadi sejalan dengan pernyataan Ketua RW 1, bahwa :

“Kami selaku Ketua RW mendapatkan keluhan ataupun aspirasi masyarakat akan kami sampaikan pada saat rapat bersama LPM untuk bisa di tindak lanjuti, namun rapat yang di adakan kurang intensif.”

• **Masyarakat Kelurahan Perhentian Marpoyan**

Berdasarkan wawancara terhadap masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Perhentian Marpoyan, masyarakat cenderung kurangnya memberikan aspirasi terhadap keluhan ataupun keinginan. Sebab kurangnya komunikasi ataupun tindakan penyerapan aspirasi terhap masyarakat, sejalan dengan yang disampaikan dalam wawancara dengan masyarakat.

Adapun wawancara dengan bapak Zulfikri Sebagai warga RW 1 :

“Saya sebagai masyarakat memiliki keluhan ataupun usulan terhadap kondisi di Kelurahan Perhentian Marpoyan, tapi kurang memahami kepada siapa ha ini tepatnya di sampaikan. Jadi apa yang dirasakan tak pernah tersampaikan atau keinginan untuk usulan dalam hal pembangunan sekalipun ”

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat RW 2 bapak Marzuki :

“Masalah menyalurkan aspirasi, kami sebagai warga memberikan usulan dansaran kepada Ketua RW, setelah itu ketua RW yang memprosesnya ke rapat Bersama LPM.”

Penulis merasa perlu lagi mewawancarai masyarakat lain, maka berikut hasil wawancara dengan dengan bapak Jonrizal:

“Dalam melihat peran aktif yang dilakukan LPM dalam membantu melaksanakan program pembangunan maka kami melihat LPM menjalankan perannya biasa biasa saja mengikuti apa yang telah ada.”

Dari wawancara dengan warga diatas aspirasi masyarakat kurang terserap sehingga dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak maksimalnya di sebabkan intensitas rapat yang dilakukan LPM dengan Ketua RW di Kelurahan Perhentian Marpoyan.

Berdasarkan dari observasi peneliti di lapangan, memang benar aspirasi masyarakat kurang ditampung disebabkan peran aktif LPM menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang kurang intensif berkoordinasi dengan Ketua RW Kelurahan Perhentian Marpoyan. Sehingga sarana yang disediakan kurang maksimal di manfaatkan.

• **Ketua LPM Kelurahan Perhentian Marpoyan**

Selanjutnya wawancara dengan Ketua LPM Kelurahan Perhentian marpoyan Mengenai peran aktif LPM menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, kami telah memberikan sarana terhadap masyarakat mengenai keinginan-keinginan dalam bentuk aspirasi masyarakat yang dibahas dalam rapat bersama Ketua RW.

”Kami LPM memberikan sarana ke pada masyarakat dalam bentuk kuissoner, kotak saran dan rapat yang diadakan untuk menyerap aspirasi masyarakat, sehingga kami dpat mengkoordinasikan ke pihak kelurahan mengenai hal apa-apa saja yg menjadi aspirasi masyarakat.”

Mengenai problem dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, beliau menjawab :

“Yang menjadi problem dalam hal itu adalah kurangnya partisipasi masyarakat dlam menyampaikan apirasinya, padahal kami telah memberi sarana dalam penyampaian aspirasi”

Melihat dari pernyataan diatas kurangnya penyerapan aspirasi masyarakat sehingga terjadinya rendahnya minat partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

Meskipun secara teori Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tersusun dengan Berperan, namun dalam setiap pelaksanaan suatu perencanaan masih memiliki Berbagai faktor penghambat yang dihadapi oleh LPM dalam pelaksanaan kegiatan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Ditinjau dari Indikator Peranan partisipatif terdapat hambatan yang mana ini sesuai analisis penulis berdasarkan observasi yang penulis amati langsung kelapangan dimana, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih belum maksimal sehinggah kurangnya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat .
2. Dari analisis penulis yang penulis simpulkan dari jawaban wawancara disini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memiliki keterbatasan pengetahuan dalam ikut serta untuk membantu Lurah segi pembangunan.
3. Penulis melihat hambatan lainnya dari obervasi atau pengamatan langsung yaitu tidak adanya pengawasan yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial agar lembaga pemberdayaan masyarakat bisa berperan aktif.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dapat diketahui bahwa peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Cukup berperan dimana Lembaga pemberdayaan masyarakat sudah melaksanakan tugasnya namun belum secara maksimal. Dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Kelurahan Perhentian Marpoyan LPM belum maksimal meningkatkan partisipasi masyarakat.
2. Selanjutnya dapat pula diketahui hambatan-hamtan dan kendalanya pada bidang pengetahuan lembaga pemberdayaan masyarakat, kurangnya rasa saling merangkul untuk membangun bersama antara Kelurahan dan LPM dan bersama meningkatkan partisipasi masyarakat.

5.2. Saran

1. Agar Lurah senantiasa membangun komunikasi dengan LPM agar proses Musyawarah bisa berjalan lancar.
2. Dan Lurah memfasilitasi untuk meningkatkan pengetahuan LPM dengan

bentuk pelatihan-pelatihan yang diadakan.

3. Disarankan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk lebih tegas dalam menangani anggota serta terus mengayomi masyarakat agar mereka terus ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat terwujudnya maksimalnya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

Aprillia Theresia, Krisnha dkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Alfabeta, Bandung. 2015.

Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta. 2000.

Awang, Azam dan Wijaya Mendara. *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru: Alaf Riau. 2012.

Bungin. B.M. *Penelitian Kualitatif*. PT.Kencana. Jakarta. 2010.

Budi Supriyanto, *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategi)*, Tangerang, CV Media Berlian, 2009.

Dadang Sufianto, *Etika Pemerintahan Di Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2016.

Farid, A., Andi S. A., *Studi Kebijakan pemerintah*, Bandung, Refika Aditama, 2012

Irene Diana Sari Wijayanti, *Manajemen*, (Yogyakarta: Mitra Cendikia, 2008).
Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002.

Kansil, dan Christine. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta. 2003

Koenjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Gramedia. Jakarta. 1985.

Manullang, M., *Dasar-dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2006.

Mardalis. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta. 2003.

Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.

Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: PT BumiAksara, 2014.

Moh, Mahfud MD. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Rineka Cipta: Jakarta. 2001.

- Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Redoskarya: Bandung. 2018.
- Ndraha. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru*. Rineka Cipta. Jakarta. 2011.
- Nurkholis, Manajemen Berbasis Sekolah; Teori, Model, dan Aplikasi, Jakarta: Grasindo, 2003.
- Nurman. *Strategi Pembangunan daerah*, Rajawali Pers, Jakarta. 2015
- Prof. Dr. Lijan Poltak Sinambela dkk. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.
- Riyadi & Dedy Supriyady Bratakusumah. *Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi Menggali Potensi dalam mewujudkan otonomi daerah*. PT Gramedia Pustaka utama Jakarta. 2004.
- Rauf dan Maulidiyah, 2016. *Badan Permusyawaratan Desa*, Pekanbaru, Zanaf Publishing.
- Rauf, Rahyunir & Munaf, Yusri. *Lembaga Kemasyarakatan Indonesia*. Zanaf Publishing. Yogyakarta. 2015.
- Sarlito, Wirawan Sarwono, *teori-teori psikologi sosial*, Jakarta: Rajawali Pers 2015.
- Sri Maulidiah, *Pelayanan Publik (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)*, Bandung, Indra Prahasta, 2014.
- Syafiie, Inu Kencana. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta. 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Revisi, Cetakan ke 48, Raja Grafindo, Jakarta. 2017.
- Soleman B. Taneko. *Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi pembangunan*. Jakarta: RaJawali. 1984.
- Stoner, 1996;7 (dalam Zulkifli dan Moris) 2014. Zulkifli & Moris Adidi, Yogya, 2014. *Fungsi- fungsi Manajemen*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet. 2016.
- Tika H. Moh. Pabundu, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, cetakan pertama. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2006

Zulkifli dan Nurmasari, *Pengantar Manajemen*, (Pekanbaru, Marpoyan Tujuh, 2015)

Jurnal :

Aris Wahyu Setiawan, *Peran Pegawai dalam Pelayanan Pembuatan Paspor*, eJournal Ilmu Pemerintahan. 2016.

[https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/02/e-journal%20Aris%20\(02-02-16-01-56-02\)](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/02/e-journal%20Aris%20(02-02-16-01-56-02))

Khotami. *Evaluasi Pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak*. **Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi**. 2018.

<http://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1676>

Rauf, Rahyunir. *Studi Perkembangan Lembaga Kemasyarakatan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. **Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi**. 2018.

<http://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1661>

Syaprianto, Prihatin, Panca Setyo. *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Membantu Kepala Desa menyusun Rencana Pembangunan Desa*. **Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi**, 2018. <http://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1679>

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.